



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penunjukan, penerbitan, perijinan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI DESA MUARA BASUNG KABUPATEN BENGKALIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata (S1)
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

CICI APRILIA
12170523154

PROGRAM S.1

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Cici Aprilia
NIM : 12170523154
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

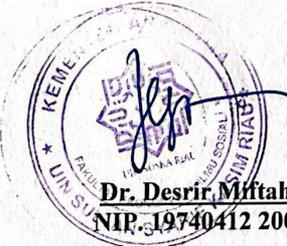


Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021

MENGETAHUI

DEKAN

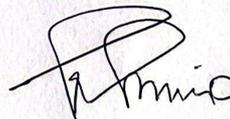
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M, Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Cici Aprilia
NIM : 12170523154
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis
Tanggal Ujian : Selasa, 15 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Penguji I
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Penguji II
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIP. 19860604 202321 1 026



Sekretaris
Syed Agung Afandi, M.I.P
NIK. 19950618 202012 1 010





- a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cici Aprilia
 NIM : 12170523154
 Tempat/ Tgl Lahir : Kampung Baru, 21 April 2003
 Fakultas : Ekonomi & Ilmu Sosial
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Bosung Kabupaten Bengkalis.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Cici Aprilia
 NIM. 12170523154

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI DESA MUARA BASUNG KABUPATEN BENGKALIS****OLEH:****Cici Aprilia****Nim. 12170523154**

Meskipun Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah dimulai sejak tahun 2016, masalah sanitasi di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis masih menjadi masalah. Dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), hanya dua yang terlaksana dengan baik, yaitu menghentikan buang air besar sembarangan dan mencuci tangan pakai sabun. Tiga pilar lainnya, yaitu Pengelolaan Air Makan Minum Rumah Tangga (PAAM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga, belum berjalan dengan baik karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diterapkan di Desa Muara Basung dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang memiliki enam variable standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial ekonomi dan politik merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metodologi studi kasus yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik setempat. Kendala utamanya adalah kurangnya koordinasi, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Agar program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dapat berjalan dengan baik di Desa Muara Basung, diperlukan dukungan kebijakan, edukasi berkelanjutan, dan partisipasi dari semua sektor.

Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY-BASED TOTAL SANITATION PROGRAM (STBM) IN MUARA BASUNG VILLAGE, BENGKALIS REGENCY

BY:

Cici Aprilia
Nim. 12170523154

Although the Community-Based Total Sanitation Program (STBM) has been started since 2016, sanitation problems in Muara Basung Village, Bengkalis Regency are still a problem. Of the five pillars of Community-Based Total Sanitation (STBM), only two have been implemented properly, namely stopping open defecation and washing hands with soap. The other three pillars, namely Household Drinking Water Management (PAAM-RT), Household Waste Management, and Household Liquid Waste Management, have not been running well due to limited infrastructure, lack of public awareness, and lack of household waste and sewage management. The purpose of this study was to see how the Community-Based Total Sanitation (STBM) program was implemented in Muara Basung Village and the factors that influenced it. The Van Meter and Van Horn policy implementation model, which has six standard variables and policy targets, resources, characteristics of implementing organizations, communication between related organizations, attitudes of implementers, and socio-economic and political environments is the theory used in this study. Using a qualitative descriptive approach and case study methodology that includes observation, interviews, and documentation. The research findings show that the implementation of Community-Based Total Sanitation (STBM) is influenced by factors such as resource availability, characteristics of implementing organizations, attitudes of implementers, and local social, economic, and political environments. The main obstacles are lack of coordination, inadequate infrastructure, and lack of community awareness. In order for the Community-Based Total Sanitation (STBM) program to run well in Muara Basung Village, policy support, ongoing education, and participation from all sectors are needed.

Keywords: *public policy, policy implementation, Community-Based Total Sanitation (STBM).*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa dituturkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Namun demikian, berkat dukungan semangat dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk bimbingan, bantuan, dan do’a yang telah diberikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si,CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan – kebijakannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
4. Bapak Dr. Khairil Hendry, S.E, M.Si., Ak Si selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F. S.Pd M.Si selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S,Sos, M.Si selaku Ketua Prodi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan jajarannya.
7. Bapak Dr. Mashuri, S. Ag, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Ibu pivit septiary Chandra, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing dan dosen konsultasi yang sudah berdedikasi penuh dalam proses pengerjaan skripsi ini, yang selalu memberi arahan dan masukan serta sering mendengarkan kendala yang dialami penulis dan selalu mendo'a kan dan mensuport penulis.
9. Ibu Ikhawani Ratna, S.E, M.si. Ak selaku pembimbing akademik yang selalu memberi arahan dan masukan masukan serta sering mendengarkan kendala yang dialami penulis dan selalu mendo'a kan dan mensuport penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Negara dan staff yang selalu memberikan ilmu pengetahuan yang selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
11. Kepada seluruh pegawai kantor desa muara basung dan Upt Puskesmas Muara Basung Serta para informan penelitian yang telah memberikan izin untuk peneliti dalam melakukan penelitian serta sudah sangat baik menerima peneliti hingga peneliti mudah menyelesaikan penelitian ini.
12. Cinta pertamaku dan panutanku bapak Ponirin, terimakasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, sehat selalu dan panjang umur bapak.
13. Ibu Dianawati, sesorang yang sudah melahirkan saya, alhamdulillah sekarang penulis sudah ditahap ini, beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun tidak hentinya memberikan kasih sayang, perhatian dan selalu memberikan doa dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, sehat selalu dan panjang umur mamak.
14. Kepada kakak saya yaitu Deby Arinda Sari dan Dwi Priskha Arianti serta abang ipar saya Romy Antoyo dan Muhammad Aris terimakasih atas doa



dan dukungannya, tanpa kalian mungkin aku aku tidak bisa sampai titik ini.

15. Kepada Nindi Setri dan Fitria Maharani sebagai sahabat penulis dari masa di bangku perkuliahan hingga pada perjuangan penulisan akhir skripsi ini, terimakasih sudah mau menjadi sahabat penulis dan mendukung, mensupport serta mendoakan penulis sampai ke tahap ini.

16. Kepada keluarga besar administrasi negara lokal A angkatan 2021, terimakasih atas kebersamaannya selama 7 semester di dalam kelas semoga kita mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

17. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini berjuang tanpa henti, melawan dirinya dari rasa ketakutan dan cemas yang terlalu berlebihan. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu saya sendiri, Cici Aprilia anak terakhir dari tiga bersaudara. Kepada Cici Aprilia, yaitu diri saya sendiri karena telah berhasil mencapai ke tahap ini dan mampu bertahan dalam segala keadaan selama perkuliahan serta mampu melewati dengan sendirinya. Terimakasih sudah kuat dan hebat.

Semoga segala doa, dukungan, motivasi, dan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II	17
LANDASAN TEORI	17
2.1 Kebijakan Publik.....	17
2.1.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	19
2.1.2 Jenis Kebijakan Publik.....	20
2.2 Proses Kebijakan.....	21
2.3 Aktor Kebijakan.....	24
2.3.1 Nilai Kepentingan Aktor Perumusan Kebijakan Publik	26
2.4 Implementasi Kebijakan	27
2.5 Model Implementasi Kebijakan	30
2.6 Pandangan Islam Tentang Implementasi Kebijakan	40
2.7 Penelitian Terdahulu	42
2.8 Kerangka Berfikir	47
2.9 Konsep Operasional	49
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN	50
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian	50
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

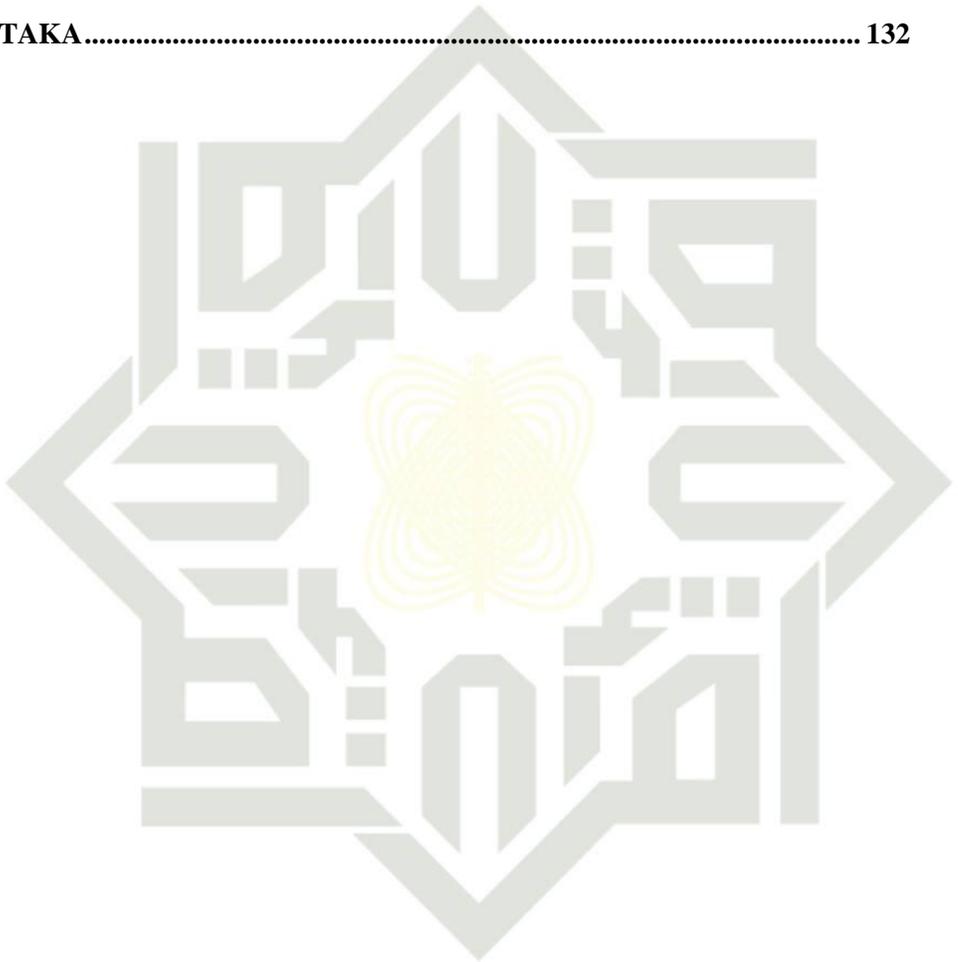
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	52
3.5 Informan Penelitian.....	53
3.6 Teknik Analisis Data dan Validasi Data	54
BAB IV	58
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	58
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bengkalis	58
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis.....	59
4.1.3 Visi Dan Misi Kabupaten Bengkalis.....	61
4.2 Gambaran Umum Desa Muara Basung	61
4.2.1 Sejarah Desa Muara Basung	61
4.2.2 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Muara Basung.....	63
4.2.3 Tugas Pokok Fungsi Kantor Desa Muara Basung	64
4.2.4 Visi Misi Desa Muara Basung	66
4.2.5 Kondisi Geografis Desa Muara Basung.....	67
4.3 Gambaran Umum UPT Puskesmas Muara Basung	67
4.3.1 Sejarah UPT Puskesmas Muara Basung	67
4.3.2 Struktur Organisasi Unit Kerja Upt Puskesmas Muara Basung.....	68
4.3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi UPT Puskesmas Muara Basung.....	69
4.3.4 Visi Misi UPT Puskesmas Muara Basung	73
BAB V	74
PEMBAHASAN	74
5.1 Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis	74
5.1.1 Standar Dan Sasaran Kebijakan.....	76
5.1.2 Sumber Daya.....	83
5.1.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	93
5.1.4 Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	99
5.1.5 Sikap Para Pelaksana	109
5.1.6 Lingkungan social, ekonomi, dan politik.....	116
5.2 Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis	125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.1 Faktor Internal.....	126
5.2.2 Faktor Eksternal	128
BAB VI.....	130
KESIMPULAN DAN SARAN	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	132



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Jamban Desa Muara Basung 2021-2024	4
Tabel 1. 2 Data Kartu Keluarga Desa Muara Basung 2025	5
Tabel 1. 3 Pilar Program STBM Desa Muara Basung Tahun 2024	9
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	42
Tabel 2. 2 Konsep Operasional Implementasi Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 1 Informan peneliti	54
Tabel 4. 1 kecamatan di kabupaten bengkalis	60
Tabel 4. 2 Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis 2025	60
Tabel 5. 1 Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	75
Tabel 5. 2 sarana dan prasarana program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wawancara Program STBM Kepada Masyarakat	7
Gambar 2. 1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn,1975	33
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	48
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Muara Basung	64
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Muara Basung	69
Gambar 5.1. 1 Mekanisme SOP Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di UPT Puskesmas Muara Basung.....	78
Gambar 5.1. 2 sampah bakaran depan rumah	82
Gambar 5.1. 3 Sampah di Seberang Pipa.....	91
Gambar 5.1. 4 Alur Flowchart Aktor Implementasi Program STBM Sesuai Acuan PMK No. 3 tahun 2014	101
Gambar 5.1. 5 TPA Di Dusun 1	128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menurut (Aisyah, Arif Budiman et al., 2024) Istilah “sanitasi total berbasis masyarakat” (STBM) mengacu pada fakta bahwa beberapa inisiatif sanitasi pemerintah melibatkan berbagai sektor. Inisiatif ini diperkenalkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kementerian kesehatan telah memprioritaskan pembangunan kesehatan dalam agendanya. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM merupakan teknik yang menggunakan metode pemicuan dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan perilaku sanitasi dan higiene. Permasalahan kesehatan lingkungan seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjalani pola hidup sehat. Intinya, penyakit disebabkan oleh hubungan yang rumit antara berbagai faktor lingkungan yang saling mempengaruhi. Sebagai inisiatif sanitasi nasional, lima pilar utama sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) adalah pengelolaan air minum dan makanan di rumah (PAMM-RT), mencuci tangan pakai sabun, mencegah buang air besar sembarangan (SBABS), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, adalah untuk mencapai sanitasi total melalui peningkatan praktik kebersihan dan sanitasi melalui pelayanan masyarakat, yang



terdiri dari empat elemen: perbaikan lingkungan, meningkatkan kebutuhan sanitasi, meningkatkan layanan sanitasi, dan mengembangkan ide-ide inovatif sesuai dengan konteks lokal. Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), yang juga dikenal sebagai *Community Lead Total Sanitation (CLTS)*, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan bersih, mencegah penyebaran penyakit berdasarkan faktor lingkungan, serta meningkatkan kapasitas komunitas. Selain itu, program ini melaksanakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas udara dan kebersihan guna mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Menurut Octavia dan Juniarsih (2020), diharapkan program ini akan menghasilkan perubahan dan lingkungan yang sehat dan aman untuk ditinggali oleh masyarakat (Stiawati, 2021).

Dasar hukum program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terdapat pada peraturan Menteri Kesehatan RI No. 03 Tahun 2014 yaitu untuk meningkatkan kebersihan dan sanitasi masyarakat secara mandiri agar masyarakat mendapat kesejahteraan dalam lingkungan yang sehat peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang meliputi pilar-pilar perilaku sanitasi yang harus diadopsi oleh masyarakat, seperti menghentikan buang air besar sembarangan, mencuci tangan dengan sabun, dan pengelolaan limbah. Pada peraturan Bupati daerah Kabupaten Bengkalis Intruksi Bupati Bengkalis nomor 112 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Sanitasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mendorong gaya hidup sehat dan bersih dan mencegah penyakit lingkungan yang menyebar terutama penyakit diare, meningkatkan kapasitas masyarakat dan meningkatkan akses ke sanitasi dasar dan air minum serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Pilar 1 STBM yang berkesinambungan dan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) dan universal akses sanitasi dan air minum tahun 2019, perlu menyelenggarakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Bengkalis.

Menurut Ditjen PP dan PL dalam (Rumajar et al., 2019) Implementasi program STBM diawali dari pilar-pilarnya, seperti Berhenti Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Prioritas satu dilakukan pada pilar Stop Buang Air Besar (Stop Buang Air Besar), yang berperan sebagai pintu gerbang kebersihan secara menyeluruh dan bertujuan memutus rantai pencemaran kotoran manusia baik air, bahan baku makanan, maupun barang lainnya. Menurut Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadillah Supari dalam (Herniwanti, Edi Sudarto, 2020) memperkenalkan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada tahun 2008 dan membentuk inisiatif nasional untuk mengadopsi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di 10.000 desa dan kelurahan. Pendekatan ini saat ini merupakan rencana nasional utama untuk kabupaten dan wilayah sanitasi pedesaan, dan diterapkan di semua tingkat pemerintah daerah, serta oleh penyandang dana dan mitra lainnya Permenkes RI No.3 Tahun 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1 Jumlah Jamban Desa Muara Basung 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Fasilitas Jamban	Jumlah Sarana	Jumlah Penduduk Pengguna
1	2021	8.998	Sharing/Komunal	10	33
			Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	70	100
			Jamban Sehat Permanen (JSP)	550	1.500
			jumlah jamban sehat	630	7,0 %
2	2022	6.586	Komunal	0	0
			Leher angsa	700	2.850
			Plengsengan	0	0
			Cemplung	0	0
			Penduduk dengan akses sanitasi layak	2.850	43%
3	2023	Jumlah KK 1.708	Fasilitas Jamban		Jumlah
			Akses Sanitasi Aman		-
			Akses Sanitasi Layak Sendiri		1.234
			Akses Layak Bersama		50
			Akses Belum Layak		10
			BABS Terbuka/Tertutup		-
			Total	1.294	0,75%
4	2024	Jumlah KK 2.321	Fasilitas Jamban		Jumlah
			Jamban Aman/Leher Angsa+Sepsitank		1.436
			Jamban Sharing		20
			Jamban Belum Layak		0
			Jamban Layak		552
			Plengsengan		
Total	2.008	0,86%			

(Sumber : Upt Puskesmas Muara Basung 2024)

Berdasarkan data diatas desa muara basung sudah memenuhi syarat *Open Defecation Free* (ODF) yaitu masyarakat harus mempunyai jamban yang menggunakan septic tank hal itu dibantu oleh TNI yang masuk ke desa untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan daerah yang belum mempunyai jamban, namun belum semua masyarakat memiliki jamban layak karena faktor ekonomi, pekerjaan dan kondisi geografis.

Kabupaten Bengkalis merupakan sebuah wilayah di Provinsi Riau yang mempunyai sektor industri migas yang sangat dominan (*leading industrial*) terhadap perekonomian daerah Kabupaten Bengkalis menurut Alamanda, 2016 dalam (Hanifurrahman et al., 2019). Dampak industri migas terhadap akses sanitasi masyarakat di kabupaten Bengkalis khususnya di kecamatan pinggir desa muara basung sangat buruk. Sementara itu, masalah sanitasi yang buruk ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan sanitasi.

Tabel 1. 2 Data Kartu Keluarga Desa Muara Basung 2025

No	Tahun	Jumlah Kartu Keluarga (KK)	Jumlah penduduk Jiwa	
			Laki laki	perempuan
1	2024	2321	5091	4849
2	2025	2831	5099	4856

(Sumber : Kantor Kepala Desa Muara Basung, 2025)

Desa Muara Basung adalah desa yang paling besar di kecamatan Pinggir dengan jumlah penduduk yang tinggi yaitu 2.831 KK dengan 9.955 jumlah jiwa,



dengan 4 Dusun Adalah: Dusun I Simpang, Dusun II Sialang Rimbun, Dusun III Sialang Muda, Dusun IV Sako Jaya.

Sebelum program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) diterapkan di Desa Muara Basung, masyarakat menghadapi berbagai masalah sanitasi dan perilaku hidup bersih. Banyak warga masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di semak, sungai, atau tempat terbuka karena minimnya akses jamban sehat. Banyak rumah belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak, masih menggunakan jamban cemplung atau seadanya yang tidak higienis. Kebiasaan cuci tangan pakai sabun setelah buang air, sebelum makan, dan mengolah makanan juga belum umum dilakukan. Pengelolaan sampah belum terorganisir, sebagian warga membakar, menimbun, atau membuang sampah ke sungai. Akibat sanitasi buruk dan rendahnya kebiasaan hidup bersih, penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan mudah menyebar. Sebelum adanya program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), penyuluhan dan pendampingan terkait sanitasi dan PHBS dari pemerintah atau tenaga kesehatan masih sangat minim.

Sejak tahun 2016 Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sudah ada di Desa Muara Basung namun karena kurangnya infrastruktur dan akses sanitasi yang buruk menyebabkan beberapa pilar sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) belum dapat berjalan. Masyarakat serta pemerintah desa muara basung dalam mengimplementasikan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sangat antusias dan sangat mendukung namun karena adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendala dalam sanitasi dan kurangnya infrastruktur pembangunan yang memadai, upaya untuk mencapai tujuan sanitasi total masih menghadapi tantangan signifikan yang perlu diatasi secara bersama. Menurut Marwanto *et all.*, 2019 (Herniwanti, Edi Sudarto, 2020) Bantuan, fasilitas, dan pengetahuan tenaga kesehatan semuanya mempengaruhi bagaimana program STBM dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan Syarifuddin *et all.*, 2018 dalam (Herniwanti, Edi Sudarto, 2020) program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Ini akan berjalan dengan baik jika ada bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah.



Gambar 1. 1 Wawancara Program STBM Kepada Masyarakat

(Sumber: Dwi Priskha, 3 Januari 2025)

Peneliti melakukan penelitian di Desa Muara Basung disebabkan oleh adanya fenomena dalam pengimplementasian program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) peneliti juga melakukan observasi secara langsung dan wawancara dalam fenomena yang terjadi, menurut sumber informasi menyatakan



bahwa “masih banyak warga yang kekurangan sumber air yang bersih termasuk saya lalu Pengelolaan sampah rumah tangga juga masih dibakar masing masing dan pengelolaan limbah cair rumah tangga juga masih dibuang ke belakang rumah” hal ini bertentangan dengan tujuan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) karena di lapangan masih banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut. Faktor penyebab implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa muara basung belum berjalan secara keseluruhan karena keterbatasan infrastruktur untuk PAMM-RT, masyarakat juga kurang memahami hidup bersih sebagaimana masyarakat masih membuang limbah cair rumah tangga dibelakang rumah dan pengelolaan sampah rumah tangga yang masih dibakar dibelakang rumah masing masing.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam (Stiawati, 2021) Ada tiga elemen yang diperlukan untuk mencapai kondisi higienis yang lengkap dengan perubahan praktik sanitasi dan higiene melalui pemberdayaan masyarakat yaitu pembentukan lingkungan yang mendukung, memperluas akses terhadap sanitasi, dan menciptakan inovasi yang relevan dalam konteks regional. Pengelolaan limbah yang tepat, akses terhadap air bersih, dan peningkatan perilaku higienis merupakan komponen inisiatif sanitasi yang bersama-sama meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain meminimalkan risiko penyakit, praktik sanitasi yang baik juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya pengobatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu factor penting dalam menjalankan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ini adalah keberadaan puskesmas, khususnya kerjasama tenaga kesehatan menurut Agustin Andila Nandya, 2020 dalam (Herniwanti, Edi Sudarto, 2020) . Karena puskesmas bertugas memantau dan menilai program selain menyebarkan informasi tentang nilai kesehatan dan sanitasi maka dari itu staff sanitasi puskesmas juga berperan sebagai fasilitator dan membantu masyarakat untuk melaksanakan prinsip Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Tenaga kesehatan berperan penting dalam keseluruhan kegiatan kesehatan dan sanitasi kepada masyarakat, mereka memberikan arahan, materi, dan pengawasan untuk menjamin bahwa komite desa melaksanakan tugasnya secara efisien.

Fenomena dalam penelitian ini meskipun program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah digalakkan di Desa Muara Basung dari tahun 2016, belum seluruh pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berhasil diterapkan secara optimal berikut merupakan data dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(STBM) di Desa Muara Basung:

Tabel 1. 3 Pilar Program STBM Desa Muara Basung Tahun 2024

No	Jenis Pilar	Sudah Terlaksana	Belum Terlaksana	Capaian %
1	Stop Buang Air Besar Sembarangan	✓	-	90%
2	Mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas	✓	-	90%
3	PAMM-RT	-	✓	25%
4	Pengelolaan Sampah	-	✓	25%



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	Rumah Tangga				
5	Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga	-	✓		40%

(Sumber: Upt Puskesmas Muara Basung, 2024)

Berdasarkan data diatas pelaksanaan 5 pilar program STBM di Desa Muara Basung belum berjalan secara keseluruhan, status *open defecation free* (odf) sudah tercapai namun tidak semua masyarakat memiliki jamban yang layak akibat faktor ekonomi, pekerjaan, dan geografis data sarana jamban 2024 menunjukkan bahwa dari 2.321 KK hanya tersedia jamban sehat 2.008 artinya tidak semua warga memiliki jamban yang sehat. Distribusi air bersih belum menjangkau seluruh dusun khususnya dusun IV Sako Jaya yang masih terkendala jarak dan sarana prasarana. Pada pilar pengelolaan sampah rumah tangga dengan capaian 25% karena masyarakat masih membakar didepan dan dibelakang rumah masing-masing dan tidak ada pemilahan sampah dan juga layanan pengangkutan sampah hanya tersedia di Dusun I. Pada pilar limbah cair rumah tangga capaian hanya 40% karena umumnya masyarakat masih membuangnya ke belakang rumah masing-masing sebab fasilitas selokan drainase atau sumur resapan belum tersedia secara merata ke rumah masing-masing masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan anggaran menyebabkan program ini belum sepenuhnya telaksanakan karena tidak ada anggaran khusus program ini dan anggaran tersebut terbagi ke berbagai program yang ada di desa.

Data di lapangan menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga terkait,



infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik. Untuk mencapai hasil implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang sesuai target di Desa Muara Basung Perlunya kebijakan pemerintah desa dalam memfasilitasi pelaksanaan program tersebut. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tersebut perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan masyarakat setempat agar dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga tujuan peningkatan kesehatan lingkungan dapat tercapai.

Banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), menurut penelitian (Jati & Susiloadi, 2022) menyatakan bahwa kebijakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat telah dilaksanakan secara efektif. Namun Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi selama implementasi, terutama karena pandemi COVID-19, yang menghambat kegiatan seperti pemantauan dan evaluasi, serta ketersediaan sumber daya keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan (Nuraeni *et, all.*, 2022) mengungkapkan bahwa tujuan mencapai status bebas buang air besar terbuka *open defecation free* (odf) belum sepenuhnya terwujud. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program termasuk partisipasi masyarakat, komitmen, kondisi lingkungan, keterlibatan pemerintah, dan peraturan lokal. Penelitian ini menyoroti bahwa proses implementasi harus mempertimbangkan suatu masalah dan menangani semua aspek masalah dari tahap awal hingga verifikasi untuk meningkatkan efektivitas program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmuniyati & Sahayati, 2021) menyatakan bahwa inisiatif Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) memberikan banyak manfaat bagi komunitas dan juga mampu mengurangi tingkat stunting serta meningkatkan kebersihan individu, yang merupakan upaya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri dan juga perubahan perilaku masyarakat untuk meningkatkan derajat kebersihan masyarakat.

Konsep implementasi yang dimaksud pelaksanaan dari suatu kebijakan berdasarkan sebuah masalah yang ada. Konsep Implementasi ini dilihat secara kualitatif bagaimana upaya pemerintah untuk menerapkan program ke masyarakat. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dapat menciptakan desa yang bersih, hal itu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan menggunakan implementasi kebijakan, peneliti tertarik dengan fenomena program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung. Mereka melakukan studi kasus tentang kekurangan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menerapkan 3 pilar program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Keterbatasan akses terhadap air bersih di masyarakat, khususnya di Desa Muara Basung, disebabkan oleh keberadaan perusahaan migas yang menyulitkan penduduk untuk mendapatkan sanitasi yang baik. Masyarakat kini hanya mengandalkan air tampungan hujan dan terminal air, yang bersifat pribadi dan hanya dapat digunakan oleh beberapa individu. Pengelolaan limbah sampah rumah tangga masih dilakukan secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri dengan cara membakar sampah, dan hanya 1 dusun saja yakni dusun simpang yang memiliki pengutipan sampah oleh pihak lain. Selain itu, Masyarakat masih membuang limbah rumah tangga di area belakang rumah masing-masing karena drainase selokan belum tersedia secara menyeluruh di setiap rumah.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah diatas tersebut peneliti tertarik untuk penelitian berjudul ***“IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI DESA MUARA BASUNG KABUPATEN BENGKALIS”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Bagaimana Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung, Kabupaten Bengkalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk menganalisis apa saja Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis.

4.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini:

a. Bagi Peneliti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peneliti untuk berpikir kritis saat menulis karya ilmiah. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti akan menggunakan teori-teori yang mereka temui selama kuliah di fakultas ekonomi dan ilmu sosial.

b. Bagi Institusi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah menerapkan program STBM di desa Muara Basung dengan memberikan pemikiran dan referensi.

c. Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini akan melengkapi jenis penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu, mereka akan menambahkan referensi dan bahan bacaan dari karya ilmiah.

4.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan bertujuan untuk menguraikan urutan pembahasan dengan cara yang teratur agar kerangka skripsi terlihat jelas dan tersusun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik, serta fokus studi tidak menyimpang dari inti topik. Penelitian ini dibagi menjadi enam bagian, sebagai berikut::

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan konteks penelitian, pertanyaan yang ingin dijawab, tujuan dari penelitian, keuntungan yang bisa didapatkan dari penelitian, serta susunan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan berbagai teori tentang pandangan Islam, perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan oleh peneliti, konsep operasional atau variabel, penelitian itu sendiri, serta kerangka pemikiran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi dan gambaran umum terkait objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

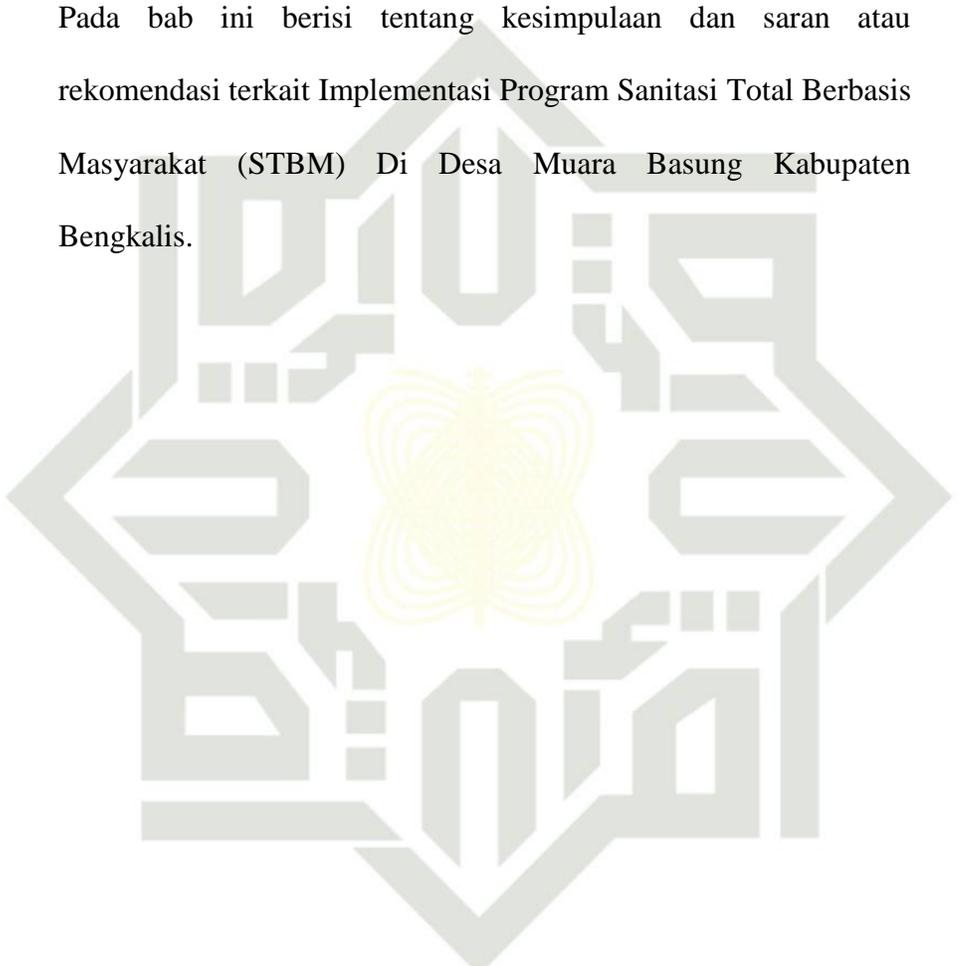
Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis



Masyarakat (Stbm) Di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis
Dan Faktor Yang Mempengaruhi.

BAB VI : KESIMPULAN SAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi terkait Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kajian Kebijakan publik mencakup beragam domain karena mengintegrasikan banyak disiplin ilmu dan sektor, seperti ekonomi, ilmu politik, sosiologi, studi budaya, yurisprudensi, antara lain. Selanjutnya, hierarki yang ditetapkan menggambarkan bahwa kebijakan publik dapat dirumuskan di tingkat nasional dan regional, meliputi peraturan legislatif, mandat presiden, serta peraturan yang diundangkan oleh otoritas provinsi dan lokal, keputusan gubernur, peraturan daerah di tingkat kabupaten atau kota, dan resolusi yang diberlakukan oleh bupati atau walikota. Easton dalam (Taufiqurakhman, 2014) Kebijakan publik digambarkan sebagai distribusi sistematis nilai-nilai oleh otoritas yang memerintah ke seluruh masyarakat, atau sebagai alternatif, sebagai penugasan nilai-nilai yang koersif kepada setiap individu dalam kerangka sosial. Both Laswell and Kaplan dalam (Taufiqurakhman, 2014) Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai sebuah program yang direncanakan dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu, atau sebagai suatu langkah untuk mencapai tujuan dan nilai tersebut melalui praktik yang terarah.

Thomas R. Dye, 1992 dalam (Taufiqurakhman, 2014) Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai segala tindakan atau ketidakberdayaan pemerintah, yang disertai dengan alasan di balik implementasinya. Penting untuk mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat yang akan dihasilkan bagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan bersama agar kebijakan tersebut memberikan keuntungan maksimal bagi masyarakat, tanpa menimbulkan masalah yang merugikan. Namun, perlu diingat bahwa dalam setiap kebijakan pasti akan ada pihak-pihak yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Menurut Said Zainal Abidin (2004), (Taufiqurakhman, 2014) kebijakan umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yang memandu pelaksanaan di seluruh area atau lembaga yang relevan;
- b. Kebijakan implementasi, yang merinci kebijakan dasar dan peraturan pemerintahan mengenai penerapan undang-undang di tingkat nasional; dan
- c. Kebijakan teknis serta operasional, yang berada di bawah naungan kebijakan implementasi.

William N. Dunn, 2003 dalam (Taufiqurakhman, 2014) mengatakan bahwa Dalam perspektif sejarah, analisis kebijakan adalah usaha ilmiah untuk menyinkronkan informasi dan tindakan. Pemerintah membuat kebijakan public menurut David Easton juga memberikan nilai-nilainya kepada masyarakat yang dikutip Dye, 1981 dalam (Taufiqurakhman, 2014). Kebijakan public akan mendapat tentangan ketika diberlakukan jika mengandung cita-cita yang berlawanan dengan kaedah dalam masyarakat. Sebaliknya, sebuah kebijakan. Masyarakat luas perlu mengakui dan mengadopsi tradisi serta nilai-nilai yang ada dan beradaptasi dalam



komunitas. Hal ini karena kebijakan publik mencakup beragam aspek atau area pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan, pangan, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan lain-lain, maka cakupannya sangatlah luas.

2.1.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno, 2010 dalam (Marwiyah, 2022) antara lain:

- a. Kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan ini dapat dilakukan secara sengaja atau muncul akibat peristiwa yang tidak terduga dan kebetulan. Kebijakan publik ini beroperasi dalam konteks politik yang lebih luas dicirikan oleh perencanaan sistematis.
- b. Kebijakan pada dasarnya terdiri dari serangkaian tindakan yang saling terhubung, mengikuti pola-pola yang telah ditetapkan, dan bertujuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang terencana dan sistematis oleh perwakilan pemerintah dan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.
- c. Lingkup kebijakan tidak cukup mencakup pengambilan keputusan legislatif dalam domain masing-masing; melainkan, kebijakan tersebut sebagian besar diatur oleh resolusi yang berkaitan dengan penegakan tindakan koersif.
- d. Kebijakan secara intrinsik terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah deklarasi formal yang dibuat oleh pemerintah dalam domain tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kebijakan publik dapat menghasilkan hasil yang positif atau negatif, karena mencakup pilihan yang dibuat oleh pejabat negara mengenai ketidakaktifan yang mungkin menimbulkan tantangan, yang memerlukan intervensi pemerintah sebagai respons terhadap masalah atau komplikasi yang ada.

2.1.2 Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson seperti yang dikutip oleh Suharno (2010) dalam (Marwiyah, 2022) menyampaikan bahwa kelas kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan *procedural* dan kebijakan *substansif*

Kebijakan *procedural* adalah cara peraturan diterapkan, sedangkan Kebijakan *substansif* merujuk pada kebijakan yang menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah.

b. Kebijakan *distributive*, kebijakan *regulatori* dan kebijakan *redistributive*

Pendistribusian jasa atau penggunaan untuk kepentingan masyarakat atau individu dikenal dengan istilah kebijakan distributif. Kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan regulasi adalah kebijakan yang berbentuk pembatasan atau pembatasan perilaku publik oleh individu atau organisasi. Disisi lain, kebijakan redistributif mengontrol cara kelompok masyarakat yang berbeda membagi kekayaan, pendapatan, kepemilikan, atau hak.

c. Kebijakan material dan kebijakan simbolik

Kelompok sasaran mendapatkan keuntungan dari sumber daya tertentu melalui kebijakan material, sedangkan kelompok sasaran mendapatkan keuntungan melalui kebijakan simbolik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.2 Proses Kebijakan

Ada sejumlah aktivitas intelektual yang terjadi selama proses analisis kebijakan dimana para aktor pemerintahan berfikir secara rasional dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang bersifat politis. Aktivitas politis yang dilakukan para actor pemerintahan dapat berupa serangkaian tugas termasuk Proses ini meliputi penyusunan agenda, pembuatan kebijakan, adopsi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta penilaian kebijakan. Analisis kebijakan menurut Dunn, 1998 dalam (Maulana & Nugroho, 2019), adalah Serangkaian aktivitas intelektual yang terjadi dalam konteks kegiatan politik. Didalam buku (Maulana & Nugroho, 2019) ada 5 tahap penting dalam proses analisis kebijakan publik menurut Dunn:

1. Penyusunan agenda kebijakan (*agenda setting*)

Pada titik ini, penting untuk memutuskan bagaimana mengatasi permasalahan publik yang memerlukan penyelesaian. Menurut Subarsono, 2003 (Maulana & Nugroho, 2019) Ada tiga tugas yang harus diselesaikan untuk mempersiapkan kebijakan agenda, khususnya:

- a) Menumbuhkan kesadaran di kalangan pihak berwenang Bahwa suatu fenomena dapat diidentifikasi sebagai sebuah permasalahan yang nyata.



karena suatu gejala mungkin dianggap sebagai masalah oleh sekelompok masyarakat tertentu, namun tidak dipandang sebagai suatu masalah oleh kelompok masyarakat lainnya;

- b) Menciptakan batasan untuk masalah tersebut; dan
- c) Menggerakkan orang untuk mendukung agar masalah tersebut menjadi agenda pemerintah. Oleh karena itu, Sebuah masalah mungkin tidak akan dibicarakan sama sekali pada fase ini, sedangkan isu lainnya bisa ditunda dalam jangka waktu yang cukup panjang.

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)

Sebuah topik yang telah dibahas dan ditambahkan ke dalam agenda oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah ini didefinisikan untuk menentukan solusi optimal. Pada tahap ini dibutuhkan peramalan, untuk sebuah proses dalam menggambarkan setiap alternatif kebijakan dengan menggunakan metodologi tertentu. Untuk sampai pada suatu kebijakan yang dipilih, analisis kebijakan harus mengumpulkan dan mengkaji data yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, menciptakan alternatif kebijakan, menggalang dukungan, dan terlibat dalam negosiasi selama tahap perumusan. Oleh karena itu, setiap karakter akan "bermain" pada tahap ini untuk menyarankan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para pembuat keputusan, terdapat satu yang pada akhirnya diterima dengan dukungan dari pihak lain seperti mayoritas legislatif, atau kesepakatan di antara para pihak. Pada saat ini, opsi kebijakan ditentukan oleh dukungan pemangku kepentingan. Menurut Effendi, tahap ini ditentukan setelah proses rekomendasi yang dikutip oleh Safrina, 2003 (dalam Delly & Arif, 2019) langkah rekomendasi meliputi:

- a. Menentukan opsi Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai masa depan yang diinginkan, yang menjadi cara paling efektif untuk mendapatkan hasil yang spesifik.
- b. Menetapkan kriteria untuk menilai opsi yang ada;
- c. Melakukan evaluasi terhadap opsi melalui penggunaan kriteria yang sesuai, agar pengaruh baik dari kebijakan yang diusulkan dapat melebihi dampak negatifnya.

4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Jika suatu program kebijakan tidak dilaksanakan, maka program tersebut hanya akan ada sebagai catatan-catatan elite. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah ditetapkan sebagai pilihan administratif dalam penyelesaian sebuah masalah harus di implementasikan yang dilaksanakan oleh para administrator ataupun dilaksanakan perwakilan pemerintah ditingkat bawah. Penting bagi lembaga pemerintah tingkat bawah dan entitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



administratif untuk melakukan solusi masalah. Unit administratif yang memobilisasi personel dan sumber daya keuangan melaksanakan kebijakan yang telah diadopsi. Dalam implementasi kebijakan ini akan ada persaingan antar kepentingan yang berbeda sepanjang tahap implementasi ini. Para pelaksana mendukung beberapa penerapan kebijakan tersebut, namun mereka mungkin menentang sejumlah kecil penerapan kebijakan lainnya.

5. Penilaian kebijakan (*policy assesment*)

Tahap ini menandai berakhirnya penciptaan kebijakan publik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk memastikan seluruh prosedur pelaksanaan selaras dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, baik yang sudah diatur sebelumnya atau belum. Karena tujuan utama kebijakan publik adalah untuk mencapai dampak yang diinginkan, maka metrik atau standar ditetapkan untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik telah menunjukkan hasil yang diharapkan. Temuan evaluasi mungkin digunakan untuk menginformasikan pengambilan kebijakan di masa depan, sehingga berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

2.3 Aktor Kebijakan

Menurut Agustino, 2008 (Winengan, 2019) berbicara tentang kebijakan publik tidak bisa tanpa menyebutkan orang-orang yang terlibat dalam pembuatannya. Pejabat atau individu yang berpartisipasi disebut sebagai aktor. Mereka yang memiliki wewenang yang sah untuk mengambil bagian dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan kebijakan publik dikenal sebagai pembuat kebijakan publik. Aktor dan pejabat legislatif, eksekutif, administratif, dan yudikatif secara normatif terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Sekelompok organisasi atau pemain yang saling terkait dan memiliki wewenang dalam mengalokasikan nilai untuk masyarakat dapat disebut sebagai aktor formulasi kebijakan menurut Halim, 2014 (Winengan, 2019).

Andesron (Winengan, 2019) mengemukakan bahwa Dua jenis aktor yang terlibat dalam kebijakan adalah kelompok formal (pembuat kebijakan resmi), yang terdiri dari legislator, pelaksana, dan pengadilan, serta kelompok partisipatif informal (peserta tidak resmi) yang mencakup tentara nasional, media massa, perguruan tinggi, politik partai, kelompok kepentingan, dan organisasi penelitian. Menurut Darwin, 2002 (Winengan, 2019) dalam pemerintahan demokratis, aktor-aktor yang melakukan analisis struktural terhadap nilai-nilai pengalokasian pemerintah untuk masyarakat umum tidak tertinggal sebagai kekuatan dominan di balik institusi pemerintah. Sebaliknya, mereka harus hadir dalam bentuk aktor dari institusi non-pemerintah sebagai bagian dari jaringan yang mencakup berbagai pemangku kepentingan.

Masyarakat sipil, atau masyarakat umum, adalah ide yang menggambarkan esensi dari komunitas mandiri yang memiliki kemampuan untuk berfungsi dengan cara yang konstruktif untuk mengejar tujuan sebagai organisasi sosial dan untuk berkontribusi pada keberlanjutan system secara menyeluruh. Di sisi lain,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok bisnis memiliki kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi kebijakan publik. Seiring Bisnis semakin terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik seiring kemajuan ekonomi negara menuju tujuannya. Bisnis ini memiliki kemampuan untuk secara signifikan meningkatkan Atau, sebaliknya, meningkatkan kualitas kebijakan publik yang ditetapkan menurut Hamdi, 2014 (Winengan, 2019).

Menurut Islamy, 2009 (Winengan, 2019) Aktor lokal dalam kategori infrastruktur politik berfungsi untuk mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat, termasuk partai politik, media massa, organisasi masyarakat, organisasi profesional, dan lainnya. Kelompok aktor ini sering disebut sebagai pemerintah non-resmi. Menurut Howlet dan Rames, 1995 (Winengan, 2019) actor yang dianggap resmi yaitu aktor dalam kelompok politik supra-struktural yang memainkan peran penting dalam mencapai berbagai tujuan publik. Kelompok aktor terdiri dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan institusi pemerintah atau badan legislatif yang berada di atas struktur politik disebut sebagai institusi.

2.3.1 Nilai Kepentingan Aktor Perumusan Kebijakan Publik

(Winengan, 2019) menyatakan bahwa keberadaan dan keterlibatan aktor dalam proses perumusan kebijakan publik Sangat penting untuk menetapkan proses dan arah dalam pengambilan keputusan kebijakan. Namun, jika dilihat dari perspektif perumusan kebijakan sebagai arena



persaingan kepentingan, tentu terlihat jelas bahwa para aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan memiliki nilai kepentingan yang berbeda-beda.

Para aktor dalam pengambilan keputusan harus memprioritaskan isu dan konteks yang ada, sambil juga mengidentifikasi dan menangani konflik yang muncul. (Winengan, 2019) menjelaskan bahwa Perumusan kebijakan sebagai bagian dari aktivitas politik, di mana para aktor memanfaatkan momen tersebut sebagai arena untuk mempertaruhkan kepentingan mereka, akan menciptakan ruang bagi terjadinya interaksi antaraktor. Hal ini bertujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing secara efektif.

2.4 Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Horn dikutip (Maulana & Nugroho, 2019) menyatakan Implementasi kebijakan adalah rangkaian langkah yang dilakukan oleh orang-orang dan kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Implementasi kebijakan dianggap sebagai fase kritis dalam kerangka menyeluruh dari proses kebijakan setelah kebijakan publik dibuat. Fase pelaksanaan ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk menerapkan kebijakan, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan kebijakan yang dimaksud. Mazmanian dan Sabatier, 1983 (Maulana & Nugroho, 2019) menyebutkan Implementasi kebijakan itu upaya melaksanakan keputusan yang pada dasarnya adalah cara atau prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses formulasi kebijakan dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*, di mana langkah pertama adalah menggambarkan kebutuhan masyarakat dan mengakomodasi tuntutan lingkungan. Setelah itu, alternatif yang paling sesuai dicari dan dipilih sebelum diusulkan untuk diterapkan. Sementara itu, implementasi kebijakan mengikuti logika *top-down*, yang berarti mengubah pilihan yang masih dalam bentuk abstrak atau makro menjadi pilihan yang lebih spesifik atau mikro. Hubungan antara tujuan kebijakan dan implementasinya serta hasil dari kegiatan pemerintah dikenal sebagai implementasi kebijakan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Horn dalam Grindle (Maulana & Nugroho, 2019) Tugas implementasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan koneksi yang dapat mewujudkan sasaran dari kebijakan publik melalui tindakan pemerintah, yang melibatkan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam kebijakan tersebut.

Selain itu, evaluasi keberhasilan kebijakan atau program dapat dilakukan melalui dua perspektif: pelaksanaan dan hasil. Melihat dari sisi pelaksanaan, sebuah inisiatif pemerintah dinilai berhasil apabila dijalankan sesuai dengan pedoman dan aturan yang ditetapkan oleh penyusun inisiatif tersebut. Ini mencakup faktor-faktor seperti metode pelaksanaan, individu yang bertanggung jawab, kelompok target, serta keuntungan yang diperoleh. Di sisi lain, dari perspektif hasil, penilaian keberhasilan suatu program baru dapat dilakukan setelah program memberikan dampak yang nyata. Dengan kata lain, meskipun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebuah program mungkin berjalan dengan baik menurut kriteria proses, dampak yang dihasilkannya belum tentu sejalan. (Meutia, 2017) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan sangat berpengaruh dalam penerapan dimasyarakat, karena tindakan yang dilakukan setelah penetapan kebijakan dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melakukan intervensi merupakan inti dari kebijakan tersebut, sementara implementasi adalah langkah konkrit dari intervensi itu sendiri. Hal ini melibatkan usaha para pembuat undang-undang untuk memengaruhi birokrasi di tingkat bawah agar dapat memberikan pelayanan yang optimal atau mengontrol perilaku kelompok sasaran, karena:

1. Hasilnya tidak akan dicapai jika kebijakan tidak diterapkan.
2. Implementasi bukanlah proses yang sederhana; melainkan merupakan suatu tahap yang kompleks dan penuh tantangan.
3. Seringkali terdapat perbedaan kepentingan di antara berbagai aktor, baik itu para administrator, petugas lapangan, maupun pihak yang menjadi sasaran.
4. Selama implementasi, sering terjadi interpretasi yang berbeda tentang tujuan, target, dan strateginya.
5. Banyak variabel mempengaruhi implementasi, termasuk variabel individual dan organisasional.
6. Praktek implementasi sering menghasilkan kegagalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tingginya tingkat kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan telah mendorong munculnya penelitian baru dalam bidang studi implementasi kebijakan.
8. Tujuan dari studi implementasi kebijakan ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan atau kinerja suatu kebijakan.

2.5 Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabetier (Maulana & Nugroho, 2019), dalam tahap implementasi kebijakan, ada dua model: model top down dan model bottom up. Model elit, proses, dan incremental menggambarkan pembuatan kebijakan berdasarkan model top down, sedangkan model kelompok dan kelembagaan menggambarkan pembuatan kebijakan berdasarkan model bottom up. Kedua model ini memiliki peran yang signifikan dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan, di mana model *top down* menekankan pada keputusan yang dibuat oleh penguasa dan disebar ke bawah, sementara model *bottom up* lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dan umpan balik dari tingkat dasar.

Grindle, 1980 (Maulana & Nugroho, 2019) Memperkenalkan model penerapan sebagai suatu proses yang melibatkan aspek Politik dan administrasi, model ini menunjukkan cara keputusan diambil oleh berbagai pihak. Hasil akhir dari proses ini dipengaruhi oleh materi program yang telah dirumuskan serta interaksi antara para pengambilan keputusan dalam kerangka politik administratif. Proses politik dapat dilihat lewat pengambilan keputusan yang



melibatkan sejumlah aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi tampak dari tindakan administratif yang bisa dianalisis pada level program tertentu.

(Tachjan, 2006) menyebutkan Elemen-elemen Model pelaksanaan kebijakan publik terdiri dari beberapa komponen penting, di antaranya: (1) rencana atau kebijakan yang dijalankan; (2) target kelompok, yaitu masyarakat yang menjadi perhatian utama dan diharapkan mendapatkan keuntungan serta mengalami perbaikan atau kemajuan dari rencana tersebut; (3) penyelenggara atau pelaksana, yang dapat berupa orang atau lembaga, bertanggung jawab atas pengaturan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam proses pelaksanaan; dan (4) elemen lingkungan, yang mencakup faktor fisik, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, perlu dicatat bahwa model pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya satu jenis, melainkan beragam, tergantung pada perspektif dan pemikiran dari penciptanya.

1. Model proses atau alur Smith, 1973 (Tachjan, 2006) Menurut Smith, Dalam pelaksanaan kebijakan publik, ada empat aspek yang perlu diperhatikan. Keempat aspek tersebut meliputi: (1) Kebijakan yang diharapkan (idealised policy), yang merujuk pada interaksi sempurna yang telah ditentukan dalam kebijakan yang ingin diwujudkan; (2) kelompok yang menjadi sasaran (target groups), yaitu individu-individu yang paling langsung terpengaruh oleh kebijakan dan diharapkan mengikuti pola interaksi sebagaimana yang dimaksud oleh para perumus kebijakan; (3) organisasi pelaksana, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lembaga atau unit-unit pemerintahan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan; (4) faktor lingkungan, yaitu elemen-elemen di dalam lingkungan yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan, termasuk budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

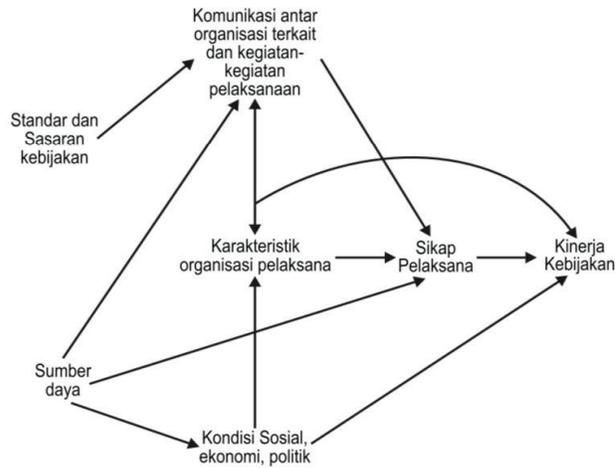
2. Van Meter dan Van Horn, 1975 (Tachjan, 2006) yang dikenal sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menguraikan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beragam variabel independen yang saling berhubungan, variabel-variabel tersebut terdiri dari:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan;
 - b. Sumber daya;
 - c. Karakteristik organisasi pelaksana;
 - d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
 - e. Sikap para pelaksana;
 - f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. 1 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn,1975

Sumber : (Tachjan, 2006)

3. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, 1978;1984 (Tachjan, 2006). Model ini dikenal sebagai *“The top down approach”*. Menurut Hood dan Gunn (1984: 199-206) (Tachjan, 2006) Agar Untuk mengimplementasikan kebijakan negara dengan optimal, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:
 - a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh organisasi pelaksana harus bas dari masalah atau hambatan signifikan.
 - b. Tersedia waktu dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan program.
 - c. Ketersediaan perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus terjamin.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Terdapat hubungan kausalitas yang dapat diandalkan sebagai dasar kebijakan yang akan diterapkan.
 - e. Hubungan kausalitas harus bersifat langsung dengan sedikit mata rantai.
 - f. Tingkat saling ketergantungan antar elemen harus minimal.
 - g. Harus ada pemahaman yang mendalam serta kesepakatan mengenai tujuan yang ingin dicapai.
 - h. Tugas-tugas perlu disusun dengan cermat dan rinci.
 - i. Koordinasi dan komunikasi antar pihak harus berjalan dengan sempurna.
 - j. Pihak-pihak yang memiliki otoritas harus dapat meminta dan menerima kepatuhan penuh dari semua pihak terkait.
4. Model atau kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh Hoogewerf, 1978 (Tachjan, 2006). Menurut Hoogewerf sebab musabab yang mungkin menjadi dasar dari kegagalan implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Sebab-musabab ini ada sangkut-pautnya berturut-turut dengan isi (*content*) dari kebijakan yang harus Implementasi Kebijakan Publik diimplementasikan, tingkat informasi dari aktor-aktor yang terlibat pada implementasi, banyaknya dukungan bagi kebijakan yang harus diimplementasikan dan akhirnya pembagian dari potensi-potensi yang ada (struktur organisasi, perbandingan kekuasaan dan seterusnya).
- Elmore dalam Hill, 1993 yang dikutip (Tachjan, 2006), Ia menyatakan bahwa, pada dasarnya semua kebijakan publik dijalankan oleh organisasi-organisasi publik yang besar, karena pemahaman mengenai organisasi-organisasi telah



menjadi elemen krusial dalam analisis kebijakan. Beberapa model pada dasarnya bersifat normatif, model-model ini didasarkan pada pendapat-pendapat yang telah dipertahankan dengan tegas tentang cara organisasi-organisasi seharusnya berfungsi. Selanjutnya, Beberapa model memiliki sifat deskriptif, yaitu berupaya untuk menyebutkan karakteristik objektif yang penting dari organisasi-organisasi tersebut. Dalam beberapa hal, cukup menantang untuk memisahkan elemen normatif dari elemen deskriptif. Namun, pada dasarnya, model ini merupakan sebuah representasi yang menyederhanakan kenyataan, bukan penggantinya. Sehubungan dengan ini, Elmore mengembangkan empat model organisasi yang merefleksikan kumpulan luas pemikiran mengenai masalah implementasi. Model manajemen sistem mencakup berbagai asumsi organisasi yang berakar dari tradisi rasional dalam analisis kebijakan;

- a. Model proses birokrasi menawarkan perspektif sosiologis mengenai organisasi yang diperbarui. Model ini secara langsung menangani analisis pelaksanaan program sosial.
 - b. Model perkembangan organisasi, yang menggabungkan teori sosiologi dan psikologi;
 - c. Model pertikaian dan negosiasi menjelaskan cara orang yang memiliki kepentingan berbeda berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
6. *Transactional Model* yang dikemukakan oleh Warwick, 1979 (Tachjan, 2006), Model ini secara fundamental didasari oleh perspektif Proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Implementasi Kebijakan Publik, yang menyatakan bahwa untuk memahami berbagai isu pada fase pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan, hubungan antara perencanaan dan implementasi tidak dapat diabaikan. Di tahap pelaksanaan, berbagai faktor akan berperan baik sebagai pendorong atau pendukung, maupun sebagai penghalang atau penunda dalam proses pelaksanaan program.

- a. Pada tahap perencanaan, terdapat beberapa keterampilan penting yang diperlukan, antara lain: (1) kemampuan kelompok perencanaan, (2) kemampuan dalam membentuk organisasi perencanaan, (3) keahlian dalam analisis teknis, dan (4) mutu informasi yang diperlukan.
- b. Pada Tahap implementasi program dan proyek pembangunan terdiri dari dua jenis faktor yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu proyek. Pertama, ada faktor penunjang (*facilitating conditions*) yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. Kedua, terdapat faktor penghalang (*impeding conditions*) yang dapat menghambat proses tersebut.

7. Gordon Chase, 1979 (Tachjan, 2006), model ini dikembangkan berdasarkan hasil studi kasus implementasi tiga jenis pelayanan masyarakat kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota *New York City* dalam bidang pelayanan kesehatan dan pengawasan obat. Dari hasil studi tersebut ditemukan bahwa, hambatan utama dalam implementasi program pelayanan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat, dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu : (1) Masalah-masalah yang timbul karena kebutuhan operasional yang melekat pada program itu sendiri; (2) Masalah-masalah yang timbul dalam kaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan guna pelaksanaan program tersebut; (3) Masalah-masalah lain yang timbul karena keterkaitan dengan organisasi atau birokrasi lainnya, yang diperlukan dukungan, bantuan dan persetujuannya guna pelaksanaan program tersebut.

8. Model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle, 1980 (Tachjan, 2006). Kerangka pemikirannya didasarkan pada tanggapan terhadap dua pertanyaan utama, terutama di negara-negara berkembang, di mana suksesnya pelaksanaan bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan, yaitu: Konten dan Situasi kebijakan, mencakup :
 - a. Kepentingan terpengaruh (*Interest affected*)
 - b. Jenis manfaat (*Type of benefits*)
 - c. Sejauh mana perubahan yang diterapkan (*Extent of change envisioned*)
 - d. Tempat pengambilan keputusan (*Site of decision making*)
 - e. Pelaksana program (*Program implementor*)
 - f. Sumber daya yang berkomitmen (*Resources committed*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. George Edwards III, 1980 (Tachjan, 2006). Berdasarkan pandangan George Edwards III (1980: 10-11), terdapat beberapa elemen yang berpengaruh terhadap suksesnya penerapan kebijakan publik:
 - a. Proses komunikasi;
 - b. Ketersediaan sumber daya;
 - c. Sikap dan perilaku;
 - d. Organisasi birokrasi.
10. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Tachjan, 2006), Dikenal sebagai *A Framework for Implementation Analysis* (1983), kerangka pemikiran ini membagi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal dalam keseluruhan proses implementasi ke dalam tiga kategori. Pembagian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier pada tahun 1983 (Tachjan, 2006) , sebagai berikut:
 - a. Ketertelusuran masalah;
 - b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menyusun implementasi;
 - c. Variabel nonstatutory mempengaruhi implementasi.

Penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya memungkinkan kita untuk memberi gambaran bahwa masalah dalam implementasi dapat diselesaikan melalui beberapa metode. Setiap model menyajikan sudut pandang yang berbeda tentang aspek tertentu dari kenyataan, seperti yang tergambar dalam diskusi antara



pendekatan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedua pendekatan ini, beserta variasi dan cabang lainnya, memberikan bagian dari gambaran yang utuh. Tersedianya berbagai metode dengan model yang berbeda-beda memiliki keunggulan relatif sebagai penjelasan dalam konteks yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn karena peneliti menurut peneliti model ini sangat cocok untuk judul yang diambil peneliti seperti:

- a. Dalam Standar dan tujuan bisa ditemukan dalam berbagai dokumen, seperti peraturan dan panduan program, termasuk instruksi pelaksanaan serta petunjuk teknis;
- b. Sumber daya harus disiapkan untuk memudahkan proses pelaksanaan;
- c. Karena karakteristik organisasi pelaksana, yang mencakup birokrasi, norma-norma, dan hubungan internal organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, karakteristik ini sangat penting untuk keberhasilan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. Komunikasi antar organisasi mencakup kerja sama antara organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, pemerintah pusat, dan daerah. Keberhasilan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sangat bergantung pada adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan public;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sikap para pelaksana merupakan salah satu variabel kunci faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Sikap yang positif dari pelaksana akan meningkatkan efektivitas implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sementara sikap negatif dapat menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksana memiliki pemahaman yang baik, menerima, dan berkomitmen terhadap tujuan program STBM;
- f. Keberhasilan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dipengaruhi oleh beragam faktor dari luar, seperti keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang berlangsung di sekitarnya;

2.6 Pandangan Islam Tentang Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam pandangan Islam merujuk pada proses penerapan keputusan atau aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam Islam, kebijakan tidak hanya dilihat sebagai keputusan administratif, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip Islam yang berkesinambungan dengan Implementasi Kebijakan yakni pada surah An-Nisa ayat 58 dan surah Asy-Syura ayat 38

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa ayat 58)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S Asy-Syura ayat 38)

QS. An-Nisa ayat 58 dan QS. Asy-Syura ayat 38 menekankan prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah sebagai landasan implementasi kebijakan. QS. An-Nisa ayat 58 mengajarkan bahwa pemimpin wajib menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan kebijakan secara adil, sedangkan QS. Asy-Syura ayat 38 menegaskan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan mencerminkan aspirasi dan kemaslahatan bersama. Kedua ayat ini menggarisbawahi bahwa kebijakan dalam Islam harus transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta Allah SWT.



Hadist yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan adalah hadis yang berbunyi, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari, No. 893; Muslim, No. 1829)

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
1	(Jati & Susiloa di, 2022)	Kualitatif	Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali	Bahwa semua parameter yang terkait dengan isi dan konteks kebijakan telah dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi selama implementasi, terutama karena pandemi COVID-19, yang menghambat kegiatan seperti pemantauan dan evaluasi, serta ketersediaan sumber daya keuangan.	Penelitian ini membahas tentang poses implementasi yang sudah diimplementasikan di desa dan kecamatan tersebut. Perbedaannya yaitu dalam prosesnya memiliki penghambat yang berbeda disatu penelitian factor penghambatnya yaitu karena pandemi COVID-19, yang menghambat kegiatan seperti pemantauan dan evaluasi, serta ketersediaan sumber daya keuangan. Namun penelitian yang dilakukan peneliti yaitu karena kekurangan sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



infrastruktur di Desa Muara Basung.

(Nuraeni et al., 2022)	Kualitas	Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kota Bandung	Tujuan mencapai status bebas buang air besar terbuka (ODF) belum sepenuhnya terwujud. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan program termasuk partisipasi masyarakat, komitmen, kondisi lingkungan, keterlibatan pemerintah, dan peraturan lokal.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam melaksanakan program ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur program tersebut. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan teori Model proses atau alur Smith, 1973 sedangkan peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, 1975 karena dianggap lebih relevan dengan fenomena yang terjadi.
(Rahmuniyati & Sahayati, 2021)	kualitatif	Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Untuk Mengurangi Kasus Stunting Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Sleman	Program STBM secara efektif berkontribusi untuk menurunkan tingkat stunting, meningkatkan kebersihan pribadi dan lingkungan, dan menumbuhkan perilaku yang lebih sehat di antara masyarakat.	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan yaitu pengakuan sanitasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam intervensi kesehatan. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini masyarakat sudah menerapkan lima pilar STBM di dalam kehidupan sehari-hari sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Studi ini menekankan penelitian lain pentingnya masyarakat belum mengintegrasikan STBM dikarenakan terkendala oleh infrastruktur. pengurangan stunting yang dipercepat untuk mengoptimalkan hasil kesehatan di wilayah tersebut.

(Azzarah & Kurniawan, 2021)	Kualitas Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Di Jawa Timur	Penelitian ini menyoroti bahwa komunitas yang telah mencapai status ODF menunjukkan peningkatan kesadaran kebersihan dibandingkan dengan mereka yang tidak, menunjukkan bahwa faktor budaya dan kognitif memainkan peran penting dalam adopsi praktik sanitasi. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi	Kesamaan dalam penelitian ini yaitu tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui praktik sanitasi yang lebih baik, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan tujuan mencapai akses 100% ke fasilitas sanitasi sehat pada tahun 2019. Perbedaannya yaitu dalam efektivitas implementasi program seperti beberapa daerah telah membuat kemajuan yang signifikan, yang lain masih berjuang dengan isu-isu seperti resistensi budaya dan
-----------------------------	---	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hambatan infrastruktur yang
perbaikan tidak memadai.
sanitasi, karena
banyak penduduk
masih sangat
bergantung pada
bantuan
pemerintah
daripada
berpartisipasi
aktif dalam
inisiatif sanitasi.

(Arsiana Abidin dan Ramadhan Tosepu, 2020)	Kualitas	Implementasi Kebijakan Program Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Pilar 1 Dalam Pengendalian Lingkungan Masyarakat Di Indonesia: A Review	Hasil penelitian menemukan bahwa sekitar 20,88% penduduk Indonesia masih melakukan buang air besar terbuka (BAB), meskipun percaya mereka menggunakan fasilitas sanitasi yang tepat. Ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara persepsi dan realitas mengenai praktik sanitasi. Penelitian ini menggarisbawahi hubungan antara sanitasi yang buruk dan masalah kesehatan, mencatat bahwa masalah	Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada masalah sanitasi di Indonesia, terutama perilaku buang air besar terbuka (BAB) dan kebutuhan jamban yang sehat dan menekankan tantangan geografis yang dihadapi oleh Indonesia, yang terdiri dari banyak pulau dan lingkungan yang beragam, yang mempengaruhi kondisi sanitasi. Perbedaannya yaitu satu studi menggunakan kombinasi kuesioner, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan data, sementara peneliti menggunakan metode observasi,
--	----------	--	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehatan lingkungan terus mempengaruhi populasi, berkontribusi pada tingginya tingkat penyakit dan kematian.

wawancara dan dokumentasi.

(Purna et al., 2019) Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Di Desa Muer Plampang menunjukkan bahwa di desa Muer, 95% rumah tangga memiliki akses ke jamban, tetapi hanya 45% dari jamban ini yang memenuhi standar kesehatan untuk diklasifikasikan sebagai jamban “sehat”. Selain itu, mengenai praktik mencuci tangan, hanya 55% rumah tangga yang memiliki fasilitas mencuci tangan, dan hanya 25% yang secara konsisten mempraktikkan mencuci tangan dengan sabun.

Persamaan dalam penelitian ini yakni pada fokus peningkatan kesehatan masyarakat melalui praktik sanitasi yang lebih baik. Kedua studi menyoroti peran penting dari keterlibatan masyarakat dan pendidikan dalam mengubah perilaku kebersihan. Perbedaan yaitu dalam temuan spesifik dan tantangan yang dihadapi. Seperti sebagian besar populasi terus mempraktikkan buang air besar terbuka yang menimbulkan risiko kesehatan, sementara yang lain menekankan kurangnya infrastruktur dan pemahaman masyarakat sebagai hambatan untuk

implementasi STBM yang efektif.

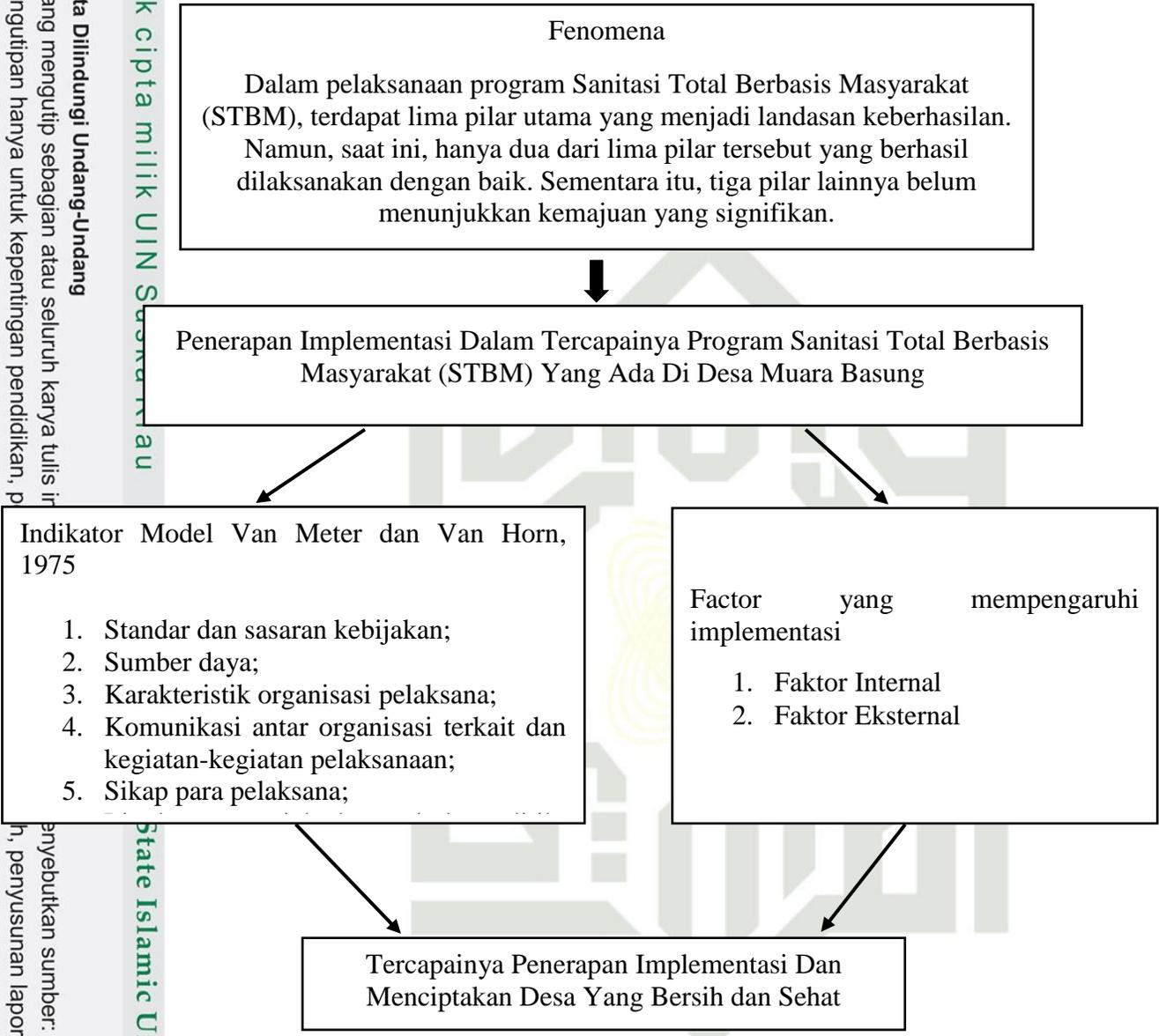
(Sumber : Olahan Peneliti)

2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara berbagai konsep, variabel, atau teori yang relevan dalam sebuah penelitian. Kerangka ini disusun untuk memberikan dasar logis dan sistematis dalam memahami masalah penelitian serta menjelaskan bagaimana penelitian serta menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

(Sumber: Olahan Peneliti)



2.8 Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional Implementasi Kebijakan

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Model Implementasi Kebijakan yang Kemukakan Oleh Van Meter dan Van Horn, 1975	Standar dan sasaran kebijakan Sumber daya Karakteristik organisasi pelaksana Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Sikap para pelaksana Lingkungan social, ekonomi, dan politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar yang jelas b. Sasaran kebijakan yang jelas a. Sumber daya manusia b. Anggaran c. Sarana dan prasarana a. Struktur organisasi b. Norma dan pola hubungan dalam birokrasi a. Prosedur dan mekanisme b. Koordinasi dan kerjasama antar organisasi a. Respon pelaksana b. Pemahaman pelaksana a. Dukungan Sosial Masyarakat terhadap Program STBM b. Kemampuan Ekonomi Masyarakat mendukung implementasi c. Dukungan Pemerintah Desa

Sumber : Van Meter dan Van Horn, 1975 (Tachjan, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan data dan penilaian peneliti, jenis Penelitian ini bersifat kualitatif.

Berdasarkan penjelasan Bogdan dan Taylor, 1982 (Abdussamad, 2021) proses penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif mengenai individu dan tindakan mereka baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan. Menurut Kirk dan Miller (Abdussamad, 2021) Penelitian kualitatif adalah salah satu pendekatan dalam bidang ilmu sosial yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap perilaku manusia di suatu wilayah dan bagaimana bahasa serta istilah berkaitan dengan individu-individu di dalamnya. Mengingat bahwa penelitian ini dilakukan dalam kondisi alami, Metode kualitatif sering kali dianggap sebagai pendekatan penelitian yang bersifat alami. Selain itu, pendekatan etnografi juga sering diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang budaya dan kondisi manusia.

3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muara Basung, yang terletak di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi ini didorong oleh berbagai faktor yang mendukung, salah satunya adalah ditemukannya permasalahan dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa yang memerlukan penelusuran akar permasalahannya. Selain itu juga karena belum banyak penelitian yang dilakukan di Desa Muara Basung yang dapat membandingkannya, Hal ini mendorong para peneliti untuk melaksanakan penelitian

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di lokasi tersebut. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 05 November 2024 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dari lokasi, dikumpulkan oleh peneliti tanpa melibatkan pihak lain. Metode untuk mengumpulkan data primer umumnya dilakukan melalui pengamatan dan interview. Jenis data ini berperan penting sebagai landasan yang dapat diandalkan dalam penelitian, memberikan informasi langsung yang meningkatkan validitas serta relevansi temuan. Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan secara langsung berasal dari subjek penelitian, yaitu Desa Muara Basung dan UPT Puskesmas Muara Basung. Penelitian ini berfokus pada implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan melibatkan wawancara mendalam dengan peserta yang terlibat dalam program tersebut di Desa Muara Basung, Kabupaten Bengkalis.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diambil dari sumber yang telah ada sebelumnya. Tipe data ini biasa digunakan untuk analisis serta penelitian yang lebih mendalam. Dengan menggunakan data sekunder, peneliti dapat



mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan, sekaligus memberikan akses ke informasi yang mungkin sulit diperoleh melalui pengumpulan data primer. Sumber data sekunder yakni, seperti laporan penelitian sebelumnya, publikasi akademis, statistik pemerintah, dan database online yang menyediakan informasi relevan untuk analisis lebih lanjut.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penulis melaksanakan penelitian ini dengan berbagai teknik pengumpulan data. Diharapkan bahwa data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik dialog yang dilakukan oleh dua individu atau lebih untuk memperoleh informasi secara mendetail, sangat terstruktur, dan ketika pewawancara meminta responden untuk berbagi pemikiran, perasaan, motif, sikap, atau keyakinan mereka tentang suatu subjek. Esterberg, 2002 (Sugiyono, 2016) mendefinisikan Wawancara merupakan sebuah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab. Dalam proses ini, makna terkait topik tertentu dapat dibangun secara bersama-sama.

b. Observasi (Pengamatan)

Sutrisno Hadi, 1986 dalam (Sugiyono, 2016) Penelitian ini mengungkapkan bahwa observasi merupakan fase yang kompleks, dengan banyak aspek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



biologis dan psikologis yang terlibat. Dua komponen kunci dalam observasi adalah proses pengamatan itu sendiri dan kemampuan memori. Dalam studi ini, observasi dilakukan untuk mengamati perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya perubahan perilaku masyarakat sebelum dan setelah penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah mengumpulkan data dengan meneliti teori, dokumen, serta arsip yang berkaitan dengan tema penelitian, baik dari buku, situs web, jurnal, atau sumber literatur lainnya. Temuan yang didapat dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh catatan mengenai pengalaman pribadi dari masa kecil, pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat, serta dalam bentuk autobiografi. Hasil penelitian akan semakin dipercaya jika didukung oleh gambar atau karya tulis akademis serta karya seni yang telah ada. (Sugiyono, 2016).

3. Informan Penelitian

Informan, atau sumber informasi, adalah orang yang memiliki pengetahuan luas dan pemahaman yang mendalam mengenai isu atau fenomena tertentu. Mereka dapat memberikan informasi dan data yang terbaru, tepat, dan bisa diandalkan. Dalam kajian ini, peneliti memakai metode pengambilan sampel yang disebut purposive sampling. (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa metode pengumpulan data dengan Pengambilan sampel secara purposive adalah metode untuk memilih sampel dengan memperhatikan kriteria tertentu. Dalam pendekatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, responden dipilih berdasarkan posisi, strata, geografi, atau kriteria lainnya. Misalnya, narasumber atau individu yang dianggap lebih mengetahui kejadian terkini dan cenderung memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat menjadi pertimbangan yang dibahas. Sehingga pencarian informasi mengenai peristiwa yang diteliti akan lebih sederhana di kemudian hari. *Key informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan peneliti

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Desa Muara Basung	1
2	Koordinator Kesling	1
3	Kaur Pembangunan	1
4	Kepala Dusun	1
5	RT/RW	2
6	Ketua PKK	1
7	BPD	1
8	Masyarakat	3
Jumlah		11

(Sumber: Olahan Peneliti)

3.6 Teknik Analisis Data dan Validasi Data

Menurut (Sugiyono, 2016) Dalam studi kualitatif, informasi diambil dari sejumlah sumber dengan memanfaatkan berbagai metode pengumpulan yang bervariasi dan dilakukan secara terus-menerus sampai mencapai titik di mana tidak ada data baru yang muncul. Dengan pengamatan yang tidak terputus, keberagaman data yang terkumpul bisa sangat besar. Secara umum, informasi yang diperoleh adalah informasi kualitatif, sehingga teknik analisis yang diterapkan sering kali tidak memiliki pola yang pasti. Hal ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam proses

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis. Menurut Bogdan, dalam (Sugiyono, 2016) Analisis data merupakan langkah terencana untuk menemukan dan merapikan informasi yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lain. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman serta menyampaikan hasilnya kepada orang lain dengan lebih jelas. Ketiga aktivitas tersebut meliputi pengurangan Data reduksi, penyajian informasi, dan pengambilan kesimpulan merupakan tiga langkah penting dalam analisis data.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses memilah, merangkum, dan menyederhanakan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang terkait dengan implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berdasarkan model Van Mater dan Van Horn. Data yang tidak relevan dieliminasi agar tidak mengganggu fokus pembahasan

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format yang jelas dan ringkas, dalam bentuk naratif deskriptif, tabel, maupun visual (seperti gambar atau flowchart) untuk mempermudah pemahaman dan analisis lanjutan. Metode ini memungkinkan pembaca untuk dengan mudah memahami informasi yang disampaikan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui teks yang jelas dan singkat, yang dirancang untuk memudahkan akses ke informasi yang mudah dimengerti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penarikan kesimpulan (verification)

peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan mencocokkan antara data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang digunakan. Kesimpulan sementara diuji dan diverifikasi ulang agar temuan yang diperoleh bersifat valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, keseluruhan proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis, mendalam, dan berorientasi pada keabsahan data.

Salah satu teknik untuk memastikan kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan oleh seorang peneliti adalah triangulasi. Ada tiga komponen dalam proses triangulasi, yakni:

- a) Triangulasi teknis adalah metode yang melibatkan konfirmasi data dengan menggunakan berbagai pendekatan tetapi berasal dari sumber yang sebanding. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b) Triangulasi sumber adalah proses membandingkan data atau informasi dari berbagai sumber untuk menjamin keakuratannya. Pada penelitian ini memperoleh data melalui wawancara dengan perangkat desa, petugas puskesmas, kader kesehatan dan masyarakat. Lalu dibandingkan dan dikonfirmasi dengan teknik lain untuk memastikan keabsahan data.

- c) Triangulasi waktu, yang melibatkan pengumpulan data pada berbagai titik waktu. Data dikumpulkan di berbagai titik sepanjang waktu. sehingga apabila terdapat beberapa pendekatan yang berbeda, maka prosedur tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang hingga diperoleh kepastian data. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara lebih dari satu kali pada setiap informan dengan waktu yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kabupaten Bengkalis

Sejarah Bengkalis dimulai saat Tuan Bujang yang dikenal sebagai Raja Kecil, yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, tiba di Bengkalis pada tahun 1722. Kedatangan beliau disambut oleh batin Senggoro dan beberapa pemimpin suku "asli" seperti Batin Merbau dan Batin Selat Tebing Tinggi. Informasi mengenai Raja Kecil sebagai pewaris kerajaan Johor semakin menumbuhkan rasa hormat para Batin yang disebutkan, sehingga mereka mengusulkan agar Raja Kecil mendirikan kerajaannya di pulau Bengkalis.

Bengkalis di masa lalu memainkan peranan yang krusial dalam catatan sejarah. Menurut kisah-kisah tradisional yang ada, pada tahun 1645, Bengkalis hanyalah sebuah desa yang dihuni oleh para nelayan. Merujuk pada catatan sejarah, pada tahun 1678, wilayah ini menjadi pusat pertemuan bagi pedagang-pedagang Melayu, Jawa, dan Arab yang datang dengan barang-barang dagangan mereka, bersamaan dengan pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, dan Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk memperoleh garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang sering ditangkap oleh penduduk Selat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara $2^{\circ}30'$ Lintang Utara (LU), $-0^{\circ}17'$ Lintang Utara atau $100^{\circ}52'$ Bujur Timur (BT), $-102^{\circ}52'$ Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Utara : Selat Malaka
- 2) Selatan : Kabupaten Siak Dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- 3) Barat : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Dan Dumai
- 4) Timur : Kepulauan Meranti

Luas area Kabupaten Bengkalis mencapai $30.646,83 \text{ km}^2$, mencakup daratan dan perairan. Kota Bengkalis berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ibukota kabupaten ini, yang terletak di Pulau Bengkalis. Beberapa wilayah administratif yang termasuk adalah lokasi-lokasi di Pulau Sumatera seperti Duri dan Dumai. Jarak dari Duri ke Bengkalis adalah 106 kilometer, sedangkan dari Dumai ke Bengkalis sejauh 78 kilometer, kedua daerah tersebut terletak di Pulau Sumatera dan dipisahkan oleh lautan.

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan, dan 136 desa. Berikut ini, akan dijelaskan kecamatan beserta ibu kota kecamatan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025 yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4. 1 kecamatan di kabupaten bengkalis

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	Mandau	Duri
2	Pinggir	Pinggir
3	Bukit Batu	Sungai Pakning
4	Siak Kecil	Lubuk Muda
5	Rupat	Batu Panjang
6	Rupat Utara	Tanjung Medan
7	Bengkalis	Bengkalis
8	Bantan	Selat Baru
9	Bathin Solapan	Sebanggur
10	Bandar Laksamana	Tenggayun
11	Talang Muandau	Beringin

(Sumber : kantor desa muara basung 2025)

Adapun luas wilayah Kabupaten Bengkalis yaitu 30.646.83 km², terdiri dari kepulauan dan laut. Terdapat sebanyak 17 pulau besar serta pulau-pulau kecil lainnya yang terletak di daerah Kabupaten Bengkalis. Hal itu dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk	
			Jiwa	%
1	Mandau	517,06	157.859	26.6
2	Pinggir	774,42	67.649	11.4
3	Bukit Batu	597,44	21.531	3.63
4	Siak Kecil	947,50	25.346	4.27
5	Rupat	1.143,72	35.697	6.02
6	Rupat Utara	377,14	14.964	2.52
7	Bengkalis	440,10	86.114	14.51
8	Bantan	461,28	43.073	7.26
9	Bathin Solapan	673,71	97.420	16.42
10	Bandar Laksamana	1.301,45	16.272	2.74
11	Talang Muandau	1.378,74	27.472	4.63

(Sumber: kantor desa muara basung 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Kecamatan Mandau yang mendominasi jumlah penduduk terbanyak yaitu 157.859 jiwa, sedangkan Rupat Utara merupakan Kecamatan yang penduduknya paling sedikit yaitu 4.964 jiwa.

4.1.3 Visi Dan Misi Kabupaten Bengkalis

Visi Kabupaten Bengkalis:

"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera"

Misi Kabupaten Bengkalis:

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

4.2 Gambaran Umum Desa Muara Basung

4.2.1 Sejarah Desa Muara Basung

Desa Muara Basung, yang berada di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, dibentuk pada tahun 1951. Sebelum desa ini diberi nama "Muara Basung", daerah tersebut dihuni oleh dua kelompok etnis asli suku Sakai, yakni suku Batin Beringin Sakai dan suku Batin Sakai Panaso Daratan. Pada waktu itu, lokasi tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih termasuk dalam wilayah Suluk Bongkal, sekitar 40 km dari jalur utama yang ada saat ini, dan dikelilingi oleh hutan yang rimbun.

Pada tahun 1951, Dinas Sosial Provinsi Riau menginisiasi program untuk memberdayakan komunitas suku Sakai. Program ini dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, H. Karim Said, dan Camat Mandau, Bukhori, dengan didampingi oleh seorang pembina bernama Soetarmo. Mereka hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termasuk dalam kategori 'terasing' atau masyarakat adat. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bathin atau Kepala Suku, Dinas Sosial mendirikan tempat tinggal dan kantor sementara. Penaso adalah nama wilayah yang menjadi bagian dari Desa Muara Basung, yang terletak jauh di dalam hutan. Dua kelompok suku Sakai tersebut akhirnya dipindahkan ke tepi jalan raya, yang kemudian menjadi cikal bakal Desa Muara Basung.

Nama Desa Muara Basung diambil dari banyaknya pohon basung yang tumbuh di sekitar pemukiman baru itu, serta keberadaan sungai di bagian pedalaman yang merupakan asal mula suku Sakai. Salah satu tokoh masyarakat suku Sakai yang ada di mengungkapkan bahwa terjadi salah kaprah dalam penamaan desa ini. Sebelumnya, kampung ini lebih dikenal dengan sebutan simpang 'Ma Basung' karena ada sungai 'ma basung' yang dikelilingi pohon-pohon basung, meskipun nama Muara Basung yang tercatat di administrasi pemerintahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Muara Basung

Desa merupakan suatu bentuk komunitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki hak untuk mengelola serta mengatur kepentingan penduduk lokal berdasarkan histori serta kebiasaan yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara luas, desa adalah kumpulan pemukiman kecil seperti kampung, dusun, atau banjar yang berada di wilayah pedesaan dan biasanya penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Singkatnya, desa adalah unit terkecil dalam sistem pemerintahan administratif di Indonesia yang merupakan komunitas masyarakat dengan ciri khas sosial, budaya, dan ekonomi yang khas, serta memiliki kewenangan mengatur urusan lokal berdasarkan adat dan hukum yang berlaku.

Susunan organisasi kantor kepala desa Muara Basung terdiri dari:

1. Kepala desa, membawahi;
2. Sekretaris Desa, membawahi;
3. Kepala urusan pemerintahan, membawahi;
4. Kepala seksi pelayanan, membawahi;
5. Kepala urusan pembangunan, membawahi;
6. Kepala urusan kesejahteraan rakyat, membawahi;
7. Kepala urusan umum, membawahi;
8. Kepala urusan keuangan, membawahi;
9. Kepala dusun I, II, III, IV.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Muara Basung

(Sumber: Kantor Kepala Desa Muara Basung 2025)

4.2.3 Tugas Pokok Fungsi Kantor Desa Muara Basung

1. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tanggung jawab dalam mengatur pemerintahan desa, menjalankan pembangunan, membina masyarakat, dan memberdayakan warga sesuai dengan kebijakan yang sudah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, serta bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan administrasi desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa dalam bidang kependudukan, peraturan, dan ketertiban umum, serta membantu tugas Kepala Desa dalam urusan tata pemerintahan.

4. Kepala seksi pelayanan

Tugasnya yaitu Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan administrasi umum pelayanan publik di desa.

5. Kepala urusan pembangunan

Tugasnya yaitu Melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di desa. Adapun Fungsinya yaitu sebagai berikut:

6. Kepala urusan kesejahteraan rakyat

Tugasnya yaitu Membantu Kepala Desa dalam urusan pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun Fungsinya yaitu Mengelola kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti bantuan sosial, santunan, dan kegiatan keagamaan.

7. Kepala Urusan Umum

Bertugas Mengelola administrasi umum, perlengkapan, dan layanan internal pemerintah desa. Fungsi dari kepala urusan umum yaitu Mengelola surat-menyerurat, arsip, dan dokumentasi administrasi desa (dll).

8. Kepala Urusan Keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertugas Mengelola administrasi keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi kepala urusan keuangan yaitu Mencatat penerimaan dan pengeluaran desa dalam pembukuan keuangan desa (dll).

9. Kepala Dusun

Bertugas Membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah dusunnya. Fungsi kepala dusun yaitu Menyampaikan program/kebijakan pemerintah desa kepada masyarakat di dusun.

4.2.4 Visi Misi Desa Muara Basung

Visi : "Terwujudnya Desa Yang Aman, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, Dan Berakhlak Mulia Serta Adil Dan Makmur "

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Maka misi rumusannya Desa Muara Basung sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM dan layanan kesehatan;
- 2) Mengembangkan pertanian dan peternakan berkelanjutan;
- 3) Mendorong ekonomi desa melalui UMKM dan potensi lokal;
- 4) Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik;
- 5) Melestarikan lingkungan dan kearifan lokal;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

4.2.5 Kondisi Geografis Desa Muara Basung

Desa Muara Basung adalah desa terbesar di kecamatan Pinggir dengan jumlah penduduk yang tinggi. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu: Dusun I Simpang, Dusun II Sialang Rimbung, Dusun III Sialang Muda, dan Dusun IV Sako Jaya, serta memiliki 38 Rukun Tetangga (RT) dan 10 Rukun Warga (RW). Pusat pemerintahan Desa Muara Basung terletak di Jl. Bathin Tarak No. 09 RT. 03/RW. 01 Dusun I Simpang dan berjarak 7 kilometer dari pusat kecamatan Pinggir, 220 kilometer dari pusat kabupaten, dan 100 kilometer dari pusat provinsi. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Semunai.
- 2) Sebelah Timur Berbatas dengan Desa Tasik Serai/Koto Pait.
- 3) Sebelah Selatan Berbatas dengan Desa Tenganau dan Desa Kuala Penaso.
- 4) Sebelah Barat Berbatas dengan Desa Tenganau.

4.3 Gambaran Umum UPT Puskesmas Muara Basung

4.3.1 Sejarah UPT Puskesmas Muara Basung

UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas Muara Basung merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berada di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Puskesmas ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dalam memberikan pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah Muara Basung dan sekitarnya.

Puskesmas ini berdiri dengan tujuan utama:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Menjalankan program-program kesehatan pemerintah seperti imunisasi, pelayanan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta promosi kesehatan.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri dengan pendekatan preventif dan promotif, serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.

4.3.2 Struktur Organisasi Unit Kerja Upt Puskesmas Muara Basung

Puskesmas adalah suatu organisasi kesehatan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, Puskesmas juga memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat agar terlibat secara aktif. Dalam pelaksanaannya, Puskesmas menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai kegiatan utama. Dengan demikian, Puskesmas memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai bagian dari struktur Pemerintah Daerah Tingkat II, penentuan wilayah kerja Puskesmas ditetapkan oleh Bupati atau Walikota, berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.

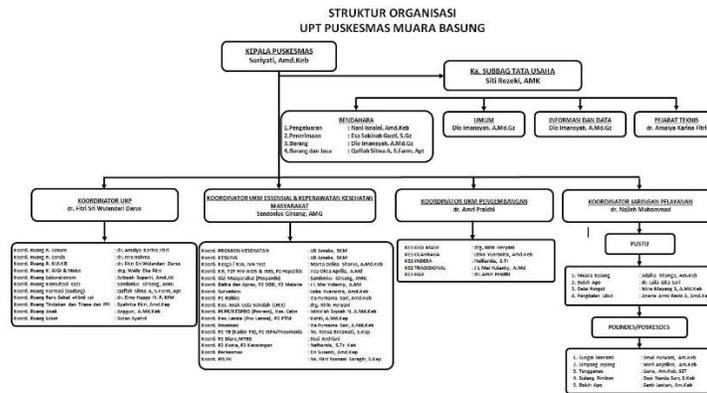
Susunan organisasi UPT Puskesmas Muara Basung terdiri dari:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Puskesmas, membawahi:
2. Ka. Subbag Tata Usaha, membawahi:
3. Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), membawahi:
4. Koordinator UKM Essensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
5. Koordinator UKM pengembangan, membawahi:
6. Koordinator Jaringan Pelayanan.



Gambar 4. 2 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Muara Basung

(Sumber: Upt Puskesmas Muara Basung 2025)

4.3.3 Tugas Pokok Dan Fungsi UPT Puskesmas Muara Basung

1. Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas memiliki tanggung jawab untuk memimpin Puskesmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia juga bertugas untuk melaporkan kinerja kepada Kepala Dinas mengenai hasil dari pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu dalam bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah beberapa fungsi dari kepala puskesmas:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja serta anggaran;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, mencakup pelayanan kesehatan individu dan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas serta jaringan pelayanan puskesmas;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- d. Menjalankan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Ka. Subbag Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan bahan pelaksanaan terkait administrasi umum yang mencakup ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Puskesmas. Fungsi Kepala Subbagian Tata Usaha yaitu:

- a. Merencanakan kegiatan dan anggaran bersama Kepala Puskesmas serta mengikuti peraturan perundang-undangan dan sumber data yang ada sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan;
- b. Memberikan arahan kepada Pelaksana/Bawahan yang sesuai dengan tanggung jawabnya dalam proses penyusunan bahan untuk administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menjalankan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Atasan sesuai dengan jabatan yang diemban.

3. Koordinator Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

Upaya kesehatan perorangan (UKP) adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, mengurangi rasa sakit akibat penyakit dan memulihkan kesehatan individu. Berikut adalah fungsi dari Upaya Kesehatan Perorangan (UKP):

- a. Mengadakan Pelayanan Kesehatan Dasar yang menyeluruh, berkelanjutan dan berkualitas;
- b. Menyediakan Pelayanan Kesehatan yang fokus pada tindakan promotif dan preventif;
- c. Melaksanakan seleksi rujukan berdasarkan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

4. Koordinator UKM Essensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat

Tanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat adalah untuk memelihara, mencegah, dan menangani masalah kesehatan yang muncul dengan fokus pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Peran Koordinator UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat meliputi hal-hal berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana untuk kegiatan pelayanan promosi kesehatan, UKS, kesehatan lingkungan, serta prosedur KIA-KB dan gizi yang terkait dengan UKM, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta keperawatan dan kesehatan masyarakat;
- b. Mengatur semua pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam kolaborasi dengan berbagai program dan sektor terkait;
- c. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan di lingkungan UKM esensial dan keperawatan kesehatan.

5. Koordinator UKM pengembangan

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) merupakan tanggung jawab utama puskesmas yang berfokus pada pencegahan serta promosi kesehatan bagi masyarakat. UKM juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Berikut adalah fungsi dari pengembangan UKM:

- a. Mengatur kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan lanjut usia;
- b. Mengatur kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan mental; dan
- c. Mengatur kegiatan terkait kesehatan gigi masyarakat serta usaha kesehatan pada sekolah dan/atau kesehatan gigi di sekolah.

6. Koordinator Jaringan Pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa. Seperti Fasilitas pelayanan terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan Desa Tugas dari koordinator jaringan pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program pengembangan jaringan;
- b. Melakukan pemantauan dan penilaian serta rencana aksi yang perlu diambil;
- c. Pelayanan praktik bidan di desa.

4.3.4 Visi Misi UPT Puskesmas Muara Basung

Mengingat potensi dan harapan di masa depan, pemerintah Kepenghuluan Bagan Batu menetapkan visi untuk periode 2023-2031 sebagai berikut: “Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas menuju masyarakat Kecamatan Pinggir yang sehat, mandiri dan sejahtera”.

Untuk mencapai visi sebagai keadaan sempurna yang ingin diraih dalam waktu tertentu Oleh karena itu, misi rumusannya UPT Puskesmas Muara Basung sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu;
2. Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lintas sektor dalam bidang kesehatan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung telah berjalan sejak 2016 dengan hasil bervariasi. Dari lima pilar, dua yang cukup berhasil adalah stop BABS dan cuci tangan pakai sabun (masing-masing 90%). Tiga pilar lainnya belum optimal: pengelolaan air minum dan makanan (25%), sampah rumah tangga (25%), dan limbah cair (40%). Kendala utama meliputi keterbatasan ekonomi, akses air bersih yang belum merata (terutama di Dusun IV Sako Jaya), serta pengelolaan sampah dan limbah yang masih tradisional. Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) mengacu pada model Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, organisasi pelaksana, serta dukungan sosial dan politik.

Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran dan literasi sanitasi, kuatnya budaya lama seperti membuang dan membakar sampah sembarangan, serta kondisi ekonomi yang terbatas. Edukasi masih minim dan tidak merata, sementara dana desa lebih difokuskan ke program stunting. Secara eksternal, hambatan meliputi kondisi geografis seperti rawa dan tanah bergas yang menyulitkan akses air bersih, infrastruktur terbatas, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Meski ada dukungan Dana Desa, anggaran masih belum mencukupi. Keberhasilan Program Sanitasi Total



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbasis Masyarakat (STBM) ke depan membutuhkan peningkatan kapasitas pelaksana, edukasi berkelanjutan, pemerataan sarana, dan sinergi antar pihak.

B. Saran

Untuk meningkatkan implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung, diperlukan peningkatan signifikan dalam penyediaan infrastruktur sanitasi, seperti akses air bersih, pengelolaan sampah, dan limbah cair, yang saat ini masih terbatas dan belum merata. Selain itu, sosialisasi yang lebih masif, rutin, dan terstruktur sangat penting untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat, karena saat ini informasi seringkali disampaikan secara informal dan belum menjangkau seluruh warga. Penguatan kapasitas dan pelatihan bagi pelaksana program, termasuk kader kesehatan dan perangkat desa, juga krusial untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dan mendorong perubahan perilaku yang konsisten. Terakhir, komitmen anggaran yang lebih besar dan koordinasi lintas sektor yang erat, didukung oleh struktur tim pelaksana yang formal, akan memastikan program berjalan efektif, berkelanjutan, dan mencapai tujuan sanitasi total di desa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- QS An-Nisa ayat 58
 QS Asy-Syura ayat 38

Buku

- Adussamad, H. Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In P. Rapanna (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Cetakan I, Vol. 11, Issue 1). CV. syakir Media Press. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M. S. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (Issue 1993). [https://lib.algazali.ac.id/assets/uploads/ebook/Kebijakan Publik Oleh Dr. Taufiqurokhman., M.Si %28 PDFDrive %29 %281%29.pdf](https://lib.algazali.ac.id/assets/uploads/ebook/Kebijakan_Publik_Oleh_Dr._Taufiqurokhman.,_M.Si_%28%28%29.pdf)
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. In *Cv. Aa. Rizky* (Issue September). https://www.researchgate.net/profile/Delly-Maulana/publication/335612363_KEBIJAKAN_PUBLIK_Cara_Mudah_Memahami_Kebijakan_Publik/links/5d7046914585151ee49e47be/KEBIJAKAN-PUBLIK-Cara-Mudah-Memahami-Kebijakan-Publik.pdf
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.
- Sugiyono, P. D. (2016). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tachjan, H. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol.11,Issue1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Winengan. (2019). Dinamika Perumusan Kebijakan Publik. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Hadist

- HR. Bukhari, No. 893; Muslim, No. 1829 Tentang tanggung jawab kepemimpinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jurnal

- Afdira, V., Chandra, P. S., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2023). *1+-+11+Vista*. 2(September), 1–11.
- Aisyah, Arif Budiman, S. H., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., Administrasi, I., Pandan, K. S., Hulu, K., & Utara, S. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT(STBM) DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. *Kebijakan Publik, 1, No. 3*, 444–455.
- Asiana Abidin dan Ramadhan Tosepu. (2020). Implementasi Kebijakan Program Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Pilar 1 Dalam Pengendalian Lingkungan Masyarakat di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1*(2), 64–71. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i2.7>
- Azzarrah, I. J., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Di Jawa Timur. *Publika, 9 Nomor 4*, 573–586. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p573-586>
- Hanifurrahman, D., Fatimah, E., & Sugihartoyo, S. (2019). Kajian Perkembangan Wilayah Kabupaten Bengkalis Berbasis Sektor Migas. *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan, 1*(1), 90–99. <https://doi.org/10.25105/pwkb.v1i1.5265>
- Herniwanti, Edi Sudarto, A. (2020). Penyuluhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 – Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Bengkalis, Riau. *Jurnal Abdidas, 1*(3), 131–136.
- Ikhshan, M., Kamaruddin, K., Nisaa, F., Vio Vani, R., & Rahmanul, R. (2024). Implementasi Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. *Iapa Proceedings Conference*, 170. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1050>
- Jati, B. D. W., & Susiloadi, P. (2022). Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. *Wacana Publik, 2*(1), 92. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63267>
- Naraeni, A., Nurasa, H., & Widianingsih, I. (2022). Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kota Bandung. *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 1*(September), 319–323. <http://scholar.unand.ac.id/57902/>
- Purnama, A., Fitriyanto, S., & Edrial. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Muer Plampang. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal, 2*(2), 40–44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmuniyati, M. E., & Sahayati, S. (2021). Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Untuk Mengurangi Kasus Stunting Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Sleman. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 80–95. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v5i1.1235>

Ramajar, P. D., Katiandagho, D., & Robert, D. (2019). ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANGANITU KABUPATEN KEPL. SANGIHE (Studi Di Desa Taloarane I). *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 9(1), 10–19. <https://doi.org/10.47718/jkl.v9i1.638>

Sawati, T. (2021). Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk Merubah Perilaku Hidup Sehat di Kelurahan Kasunyatan Kota Serang Provinsi Banten. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 179–191. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3607>

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Instruksi Bupati Bengkalis Nomor : 112 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2016



DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

“IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT(STBM) DI DESA MUARA BASUNG KABUPATEN BENGKALIS”

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

1. Apa saja SOP yang ada dalam implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa muara basung?
2. Bagaimana penerapan standar operasional atau tahapan yang jelas dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dilakukan oleh pihak desa, dan sejauh mana desa memastikan semua elemen masyarakat terlibat dalam setiap tahapannya?
3. Apa yang menjadi hambatan dalam menentukan sasaran kebijakan yang jelas dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung?
4. Apakah ibu mengetahui bahwa di desa ini sedang diterapkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)? Jika tau, dari mana ibu mengetahuinya?
5. Di mana ibu biasanya membuang sampah rumah tangga?

b. Sumber Daya

1. Apakah ada pelatihan/peningkatan kapasitas yang diberika kepada petugas dilapangan?
2. Apakah program ini sudah di sosialisasikan ke masyarakat?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menurut ibu, apakah informasi yang disampaikan oleh kadus dapat mudah dimengerti?
4. apakah desa sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dibiayai dari anggaran tersebut serta tantangan dalam pengelolaan anggaran untuk program ini?
5. Apakah sumber daya seperti sarana dan prasarana mencukupi dalam pelaksanaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa muara basung?
6. Bagaimana dengan pilar pengelolaan air makan minum rumah tangga (PAAM-RT) pengelolaan sampah rumah tangga, limbah cair rumah tangga apakah sudah disediakan sarana prasarannya?
7. Apakah menurut ibu sarana dan prasarana yang disediakan di desa sudah mendukung penerapan hidup bersih dan sehat?

c. Karakteristik organisasi pelaksana

1. apakah ada struktur organisasi dan tupoksi dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa muara basung?
2. Siapa yang bertanggungjawab dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa muara basung?
3. Apakah dalam pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung ini ada struktur organisasi khusus yang dibentuk?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah pola hubungan seperti bekerja sama dalam organisasi mempengaruhi mekanisme implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)? Berhasil/tidak?
 5. Bagaimana pola hubungan antara pemerintah desa, puskesmas, dan kader kesehatan dalam pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung?
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**
1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa ini?
 2. Bagaimana mekanisme dalam menentukan sasaran yang tepat untuk wilayah yang dianggap belum memenuhi standar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung?
 3. Apa dampak dari kendala tersebut terhadap pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa?
 4. Bagaimana koordinasi yang terjalin antara pihak kesling dengan tim stbm di desa juga masyarakat dalam pelaksanaan program stbm? Dan bagaimana evaluasinya!
 5. Walaupun koordinasi berjalan lancar dan masyarakat menunjukkan komitmen yang baik, apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa ini?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah ibu merasa pemerintah desa dan pihak lain (seperti puskesmas atau swasta) cukup mendukung masyarakat dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)?

e. Sikap Para Pelaksana

1. Seperti apa kegiatan yang dilakukan dalam memperkenalkan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ke masyarakat yang ada di Muara Basung? Apakah melalui sosialisasi, penyuluhan, atau bagaimana?
2. Faktor apa yang menyebabkan pelaksana mendukung dan tidak mendukung dalam implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung?
3. Menurut Ibu, apa yang membuat masyarakat di desa ini belum semuanya sadar atau ikut serta dalam program kebersihan seperti Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)? dan apa tantangan dalam menerapkan hidup sehat dan bersih?
4. Apakah tujuan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ini telah dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pelaksana di lapangan? Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) desa/masyarakat?
5. Apakah pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ini sudah sesuai belum dengan tujuan tujuannya?
6. Apakah menurut Ibu ada hal-hal yang masih kurang dipahami oleh pelaksana lain terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)?



f. Lingkungan social, ekonomi, dan politik

1. Bagaimana dukungan masyarakat desa ini terhadap pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)?
2. Apa bentuk dukungan sosial masyarakat yang paling menonjol dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa ini?
3. Bagaimana kemampuan ekonomi masyarakat desa muara basung dalam mendukung pelaksanaan program ini?
4. Sejak program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dijalankan, apakah ibu melihat perubahan di lingkungan sekitar rumah ibu?
5. Bagaimana peran dan dukungan pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung?
6. Bagaimana menurut Ibu dukungan dari para pemimpin desa terhadap program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)? Apakah sudah membantu masyarakat dalam hal sarana dan prasarana?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Sukirno Selaku Sekretaris Desa Muara Basung



Wawancara Dengan Ibu Uli Selaku Koordinator Kesehatan Lingkungan (Kesling) Upt Puskesmas Muara Basung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Ibu Deby Arinda Sari Selaku Masyarakat Dusun II Sialang Muda Desa Muara Basung



Wawancara Dengan Ibu Astatik Sihotang Selaku Masyarakat Dusun II Sialang Rimbun Desa Muara Basung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Ibu Inem Selaku Masyarakat Dusun IV Sako Jaya Desa Muara Basung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-9112/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Pra Riset

30 Desember 2024

**Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend.Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Cici Aprilia
NIM. : 12170523154
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

bermaksud melakukan **Pra Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Pra Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Proposal skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyami, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

k



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-742/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/01/2025 21 Januari 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Yth. Pivit Septiary Candra, S. Sos., M.Si.
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Cici Aprilia
 NIM : 12170523154
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (tujuh)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : **"IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI DESA MUARA BASUNG KABUPATEN BENGKALIS"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I

 Dr. Kamarudin, S.Sos., M.Si
 NIP. 196307012007101003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 2687/Un.04/F.VII/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

02 Mei 2025

Yth. Kepala Kantor Desa Muara Basung
Kabupaten Bengkalis
Muara Basung, Pinggir, Bengkalis Regency,
Riau 28784

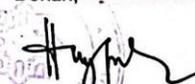
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : CICI APRILIA
NIM. : 12170523154
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: " Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2'001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN PINGGIR
DESA MUARA BASUNG**

Jl. Batin Tarak No.09 Muara Basung Kode Pos 28784

Muara Basung, 19 Mei 2025

Nomor : 423.4/Pemdes-MB/V/2025/423
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian (Riset)
Tahun 2025

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
Di
Tempat.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau Nomor : B-2687/Un.04/F.VII/PP.00.9/04/2025 Tanggal 02 Mei 2025, Perihal Permohonan Izin Riset.

Dengan ini Kepada Mahasiswa :

Nama : CICI APRILIA
NIM : 12170523154
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl.Kampung Baru RT.003.RW.004 Desa Muara Basung
Judul Riset : **Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)**
Lokasi : Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas Telah melakukan kegiatan Penelitian (Riset) dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi yang dilaksanakan di Desa Muara Basung.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3718 /Un.04/F.VIII/PP.00.9/06/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Izin Riset**

17 Juni 2025

Yth. Kepala UPT Puskesmas Muara Basung
 Muara Basung, Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis,
 Riau 28784

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Cici Aprilia
 NIM. : 12170523154
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul "**Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis**" Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
 NIP. 19700826 199903 2/001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MUARA BASUNG
KECAMATAN PINGGIR**



Jalan Bathin Tarak Nomor. 12 Desa Muara Basung Kode Pos. 28784
Telepon : 0811-7064-441 Fax -, E-mail : tu.puskmuarabasung@gmail.com

Muara Basung, 3 Juli 2025

Nomor : 400.7/UPT-TU/2025/225
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Penelitian/Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-3718/Un.04/F.VII/PP.00.9/06/2025 Tanggal 17 Juni 2025 Tentang Permohonan Izin Riset, maka dengan ini kami memberikan izin riset dan telah selesai melakukan Riset di wilayah kerja UPT Puskesmas Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis:

Nama	: CICI APRILIA
NIM	: 12170523154
Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI DESA MUARA BASUNG KABUPATEN BENGKALIS

Demikian surat ini disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT Puskesmas Muara Basung
Kecamatan Pinggir



SURIYATI, SKM
Penata, III/c
NIP.19820920 201212 2 002



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2663/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/04/2025 30 April 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Yth. **Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si.**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Cici Aprilia
 NIM : 12170523154
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI DESA MUARA BASUNG KABUPATEN BENGKALIS"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Cici Aprilia, lahir pada 21 April 2003 di Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Penulis merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara yang terlahir dari kedua orang tua hebat yaitu bapak Ponirin dan ibu Dianawati. Penulis bersuku Jawa, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah Dasar di MI Al-Muhajirin di Desa Muara Basung dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama Di SMP Negeri 1 Pinggir di Desa Muara Basung dan selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pinggir di Desa Muara Basung dan selesai pada tahun 2021. Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi SI Ilmu Administrasi Negara.

Pada semester 5 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada semester 7 penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi Di Desa Sungai Meranti, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Penulis menyelesaikan Perkuliahan dengan Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Muara Basung Kabupaten Bengkalis” di bawah bimbingan Dosen terbaik yaitu Ibu Pivit Saptiary Chandra, S.Sos., M.Si dan penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

UIN SUSKA RIAU